



VOLUME XII / NO. 116 / MEI 2017

# MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



## MANDIRI MEMBANGUN DESA SENDIRI

Pengalokasian Dana Desa yang kini memasuki tahun ketiga membuka kesempatan masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dananya pun terus dipantau dan disempurnakan. Keterlibatan seluruh warga dan aparatur desa menjadi faktor penentu keberhasilan.

# Daftar Isi



Foto Cover  
Anas Nur Huda

## 5 DARI LAPANGAN BANTENG

## 6 EKSPOSUR

## 10 LINTAS PERISTIWA

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Rizwan Pribhakti. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

## LAPORAN UTAMA

- 13 Memosisikan Desa sebagai Subyek Pembangunan
- 16 Infografis
- 18 Desa Berdaya, Desa Sejahtera
- 21 Ikut Mengawal Dana ke Desa
- 23 Dana Desa untuk Kurangi Kesenjangan

## REPORTASE

- 25 Menkeu Berikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa STAN
- 26 PMK Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Direvisi

## WAWANCARA

- 27 Kekayaan Laut Indonesia di Kepulauan Seribu

## POTRET KANTOR

- 30 Menuai Prestasi dari Tanah Poso

## FIGUR

- 32 Puisi Bernas Sang Pekerja Keras

## EKONOMI TERKINI

- 36 Mengawal Reorientasi Ekonomi Berbasis Investasi

## KOLOM EKONOM

- 40 APBN Kredibel yang Mendorong Pembangunan Infrastruktur

## GENERASI EMAS

- 44 Perjalanan Jauh yang Ditempuh Janu

## OPINI

- 46 MOFIN: Kebutuhan atau Ritual?

## REGULASI

- 48 Transformasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

## INSPIRASI

- 50 Pijar Anak Siantar di Negeri Paman Sam

## RENUNGAN

- 52 Lebih Baik Saling Memahami

## BUKU

- 53 Cara Asik Untuk Baper

## KULINER

- 54 Mengisi Perut di Kota Medan

## SELEBRITI

- 56 Ilmu Komunikasi Yang Menginspirasi



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

# PR IA

Public Relation Indonesia Award

Media Keuangan Edisi Oktober 2016  
Gold Winner  
Kategori Media Internal | Subkategori Media Cetak



Media Keuangan Edisi Maret 2016  
Gold Winner  
Kategori Media Internal | Subkategori E-Magazine

Dari Lapangan Banteng

## Memandirikan Desa dengan Dana Desa

Salah satu Nawacita Presiden Jokowi menyebutkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentu saja yang dibangun bukan hanya pinggir kota, tapi benar-benar masuk ke pedesaan. Tekad ini diwujudkan secara nyata dengan mengalirnya dana sampai ke desa yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Dalam APBN tahun 2017, belanja transfer ke daerah dan desa jumlahnya melampaui belanja Kementerian/Lembaga.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah berupaya untuk memberdayakan para apatur di daerah dalam mengelola keuangannya. Aturan baru ini, antara lain menetapkan mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat dinamis atau tidak final, dan juga adanya penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan

dan capaian atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun sebelumnya.

Dapat dilihat bahwa aturan baru ini memberikan *reward* dan *punishment* agar akuntabilitasnya terjaga. Mulai tahun depan, Dana Insentif Daerah (DID) juga akan dikaitkan dengan berbagai macam hasil, misalnya penurunan angka kemiskinan, meningkatnya jumlah tenaga kerja, dan hasil nyata lain yang dapat dibuktikan dengan data.

Dengan adanya komitmen ini, persoalannya bukan lagi mengenai ada atau tidaknya uang. Intinya, bagaimana kemudian uang ini dapat direncanakan penggunaannya, efektif pelaksanaannya, dan akuntabel pertanggungjawabannya. Sehingga, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dari seluruh aparatur pengelola keuangan di daerah, mulai level provinsi sampai dengan desa.

Upaya pemerintah untuk memberikan kepercayaan pengelolaan keuangan

daerah ini juga sekaligus menjadi tugas berat bagi Kementerian Keuangan dalam memberikan pendidikan dan pelatihannya. Untuk itu, peran Pusdiklat di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga penting agar dapat menghasilkan aparatur daerah yang cakap dan handal dalam mengelola keuangan daerah.

Untuk membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat, kepala daerah, beserta jajaran pemerintah daerah. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan juga mengharapkan agar setiap pemerintah daerah harus dapat mempunyai "menteri keuangan daerah" yang dapat mengelola keberlangsungan program pembangunan di daerah tingkat I maupun tingkat II. Dengan bersinergi, Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud.

### Kementerian Keuangan Republik Indonesia

@KemenkeuRI

Apa pembangunan nyata di daerah #temankeu yang bersumber dari #DanaDesa?

### Muhammad Nasih @nasih\_id

1.Membantu tmpt ibadah 2.Membangun gdung serbaguna 3.Adanya Wifi di balai RW 4. Perbaikan jln kampung #temankeu #DanaDesa Donowarih Malang

### upen supendi @pensupen

Kampung saya berada di desa Karyamukti, Campaka, cianjur. Berkat adanya Dana Desa sekarang jalan menuju kampung. Sekarang jalan menuju kampung saya sudah nyaman karena dibata, dulu ketika hujan jalannya sangat becek dan berlumpur, bagi

yang mempunyai kendaraan bermotor harus memutar ke jalan kampung sebelah yang seharusnya menempuh sekitar 1KM setelah di bata, sebelum dibata kita harus menempuh kurang lebih 4KM #OpiniAnda #MediaKeuangan

### Anggun Mawar Sari @anggunmawar

Pembangunan jalan untuk memudahkan akses transportasi dan waduk untuk menampung air bersih di Desa Sungai Langka #OpiniAnda #MediaKeuangan

tweet



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeu



majalahmediakeuangan



## Dosen Luar Biasa

**R**ibuan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN mengikuti kuliah umum Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kampus kedinasan itu, Senin (17/4). Yang istimewa, Menkeu mengatakan bahwa keinginan memberikan kuliah di PKN STAN muncul sendiri dari dirinya. Sebagai dosen luar biasa pada hari itu, Menkeu menyampaikan lima hal utama, yaitu perkembangan ekonomi terkini, pengertian dan filosofi APBN, kebijakan fiskal dan APBN, kemudian APBN 2016 dan APBNP 2017, serta reformasi struktural di Kementerian Keuangan.



## Pantai Alami di Negeri Laskar Pelangi

**P**ulau Lengkuas menjadi salah satu ikon pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu pulau di negeri Laskar Pelangi ini memiliki pantai alami yang menyuguhkan pemandangan mengagumkan. Sebuah mercusuar tua yang berdiri tegak sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan.

Foto  
Ardhian  
Dharma





23/03

### Kuliah Umum Menteri Keuangan di ITB

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum dengan tema “APBN Untuk Membangun Generasi Bangsa” di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jum’at (23/03). Dalam pemaparannya, Menkeu menjelaskan mengenai instrumen fiskal yang dimiliki pemerintah dan instrumen paling penting adalah APBN. “APBN adalah suatu kebijakan atau instrumen yang perlu untuk selalu siap. Untuk menjadi sehat dia harus kredibel. Kredibel itu artinya bisa dipercaya. Kalau APBN mau kredibel, apa yang ditulis dan apa yang dikerjakan harus sedekat mungkin,” kata Menkeu.



24/03

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

### Kementerian Keuangan Raih 7 Penghargaan PR Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih 7 penghargaan dalam ajang PR Indonesia Award 2017 (PRIA) di Denpasar pada Jum’at (24/03), termasuk sebagai peraih *Platinum Award* atau juara umum kategori Kementerian. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufansa Wira Sakti, PRIA menjadi ajang kompetisi yang sehat bagi institusi pengelola *Public Relation/Humas* di semua sektor. Sebagai informasi, penghargaan yang diraih Kemenkeu adalah Pemenang PRIA 2017 Kategori Media Relation (Kementerian); *Gold Winner* Kategori Program *Government PR* Strategi Komunikasi Amnesti Pajak; *Gold Winner* Kategori Department PR (Kementerian); *Gold Winner* majalah media internal; *Gold Winner Media Social* Internal; serta *Gold Winner* majalah cetak internal. Dengan 6 kemenangan ini, Kemenkeu mendapatkan *Platinum Award* Kategori Kementerian.

29/03

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

### Menkeu Serahkan LKPP pada BPK

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (*unaudited*) kepada Badan Pemeriksa Keuangan di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta (29/03). Nantinya LKPP tersebut akan diaudit dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disusun sebagai Undang-Undang mengenai laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN. Dalam LKPP 2016 (*unaudited*), terdapat capaian indikator hasil pembangunan antara lain berupa penurunan angka gini ratio, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Tercatat, gini ratio turun dari 0,4 menjadi 0,39, angka kemiskinan turun menjadi 10,9 persen, dan angka pengangguran turun menjadi 5,6 persen.



30/03

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

### Menkeu menghadiri peringatan Dies Natalis ke-52, Universitas Negeri Semarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir pada peringatan Dies Natalis ke-52, Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Kamis (30/03). Pada kesempatan tersebut, Menkeu bersama Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menandatangani prasasti peresmian dua gedung di Unnes yang diambil dari nama kedua orang tua Menteri Keuangan yaitu Prof. Satmoko dan Prof. Dr. Hj. Retno Sriningsih. “Unnes adalah sebuah perguruan tinggi yang kelahirannya dan perkembangannya begitu dekat dengan keluarga kami. Almarhum kedua orang tua kami termasuk ikut membangun Perguruan Tinggi sejak masih bernama IKIP Semarang hingga menjadi Universitas Negeri Semarang. Saya berterima kasih pada generasi penerus, para guru besar pengurus dan mahasiswa telah membuat Unnes menjadi universitas kebanggaan”, jelas Menkeu.



03/04

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

### Konferensi Pers Reformasi Pajak dan Bea Cukai

Dengan telah berakhirnya program Amnesti Pajak pada 31 Maret 2017 yang merupakan bagian pertama dari reformasi perpajakan, Tim Reformasi Perpajakan dan Kepabeanan dan Cukai pada Senin (03/04) melakukan pertemuan kedua untuk membahas perkembangan pencapaian tim serta rencana kerja ke depan. Pada rapat tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa akan menggunakan momen ini untuk membangun kepercayaan Wajib Pajak (WP) serta pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). “Kita mencari titik keseimbangan antara memperbaiki pelayanan, kepastian dan melakukan *enforcement* di dalam pelaksanaan perundang-undangan. Kita ingin memulai apa yang disebut budaya kepatuhan”, ungkap Menkeu pada konferensi pers yang diselenggarakan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam jangka pendek, reformasi perpajakan ditujukan untuk mengamankan penerimaan tahun 2017.

#### Agenda

- 05 Rapat Koordinasi Sinergi Keuangan Negara di Jakarta
- 05 Penyerahan LKPP dari BPK ke Pemerintah
- 3-5/05 Forum Ekonomi Kementerian Keuangan & Voyage to Indonesia di Palembang
- 4-7/05 Meeting ADB di Jepang
- 8-10/05 Rakernas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Cirebon
- 8-10/05 Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) di Bali
- 10/05 Rakernas Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital di JCC
- 18/05 Pertemuan Dirjen Customs Se-ASEAN di Bali



06/04

## Menkeu Menghadiri ASEAN Finance Minister' and Investors Seminar (AFMIS) ke 12

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh AS akan memberikan dampak kepada banyak negara di dunia. Kebijakan proteksi dagang yang dikeluarkan oleh Presiden Trump dapat menimbulkan kemunduran bagi globalisasi yang telah berlangsung dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, globalisasi telah memberikan manfaat bagi perdagangan dunia, melalui hubungan kerja sama saling menguntungkan. "Perdagangan itu membagi manfaat kepada kedua belah pihak. Ini bukan *zero sum game*, artinya yang satu dapat manfaat, yang lain tidak. Tidak bisa hanya baik bagi satu sisi" jelas Menkeu saat menjadi salah satu panelis dalam ASEAN Finance Ministers' and Investors Seminar (AFMIS) ke 12 di Cebu, Filipina pada Kamis (06/04). ini seperti kita pikir yang impor yang rugi, dan kamu eksportir untung. Jadi, semua progres dalam ekonomi global beberapa dekade lalu, yang didorong juga oleh perdagangan, itu mundur," jelas Menkeu saat menjadi salah satu panelis dalam ASEAN Finance Ministers' and Investors Seminar (AFMIS) ke 12 di Cebu, Filipina pada Kamis (06/04).

## Menteri Keuangan Dukung Perempuan Berkarir



13/04

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungannya kepada para perempuan untuk berkarir, karena perempuan seringkali memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat sebuah masalah. Dalam acara General Electric (GE) Women's Network, Menkeu menginspirasi peserta yang berisi para pekerja perempuan, baik dari GE maupun umum. "Saya tidak akan menyetujui proposal promosi tingkat eselon I, II, dan III apabila tidak ada kandidat perempuan," jelasnya di Fairmont Hotel pada Kamis (13/04). Lebih lanjut Menkeu menyampaikan bahwa, untuk menjadi seorang perempuan yang sukses harus dibangun sejak dini.

11/04

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Menkeu mengikuti The 3rd Member Countries Sovereign Investments Forum

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik acara *The 3rd Member Countries Sovereign Investments Forum* yang diadakan pada 10-12 April 2017 di Bali. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka berbagai peluang investasi, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi negara anggota IDB lainnya. "Forum ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk Indonesia sebagai tuan rumah, untuk menjelaskan berbagai macam proyek infrastruktur utama dan juga berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam pembiayaannya," jelas Menkeu di Bali *International Convention Center*. Di kesempatan yang sama, Menkeu juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Presiden IDB dan PT Sarana Multi Infrastruktur senilai US\$1 miliar.



# Memosisikan Desa sebagai Subyek Pembangunan



**P**engalokasian Dana Desa pada 2017 diatur dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Selasa (4/4). PMK 50/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016.

Dalam kegiatan temu wartawan yang diselenggarakan di kantor pusat Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo menjelaskan isi beleid baru itu. Menurut Boediarso, terdapat perubahan skema atau ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama dari sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, dan efektivitas penggunaannya.

Dalam postur APBN 2017, besaran TKDD yang dialokasikan mencapai Rp764,9 triliun atau meningkat dari realisasi pada 2016 sebesar Rp 710,9 triliun. "Saat ini kita sedang melakukan transformasi kebijakan pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagai kelanjutan reformasi tahun lalu," kata Boediarso dalam kesempatan tersebut. Ada enam kebijakan strategis dalam PMK 50/2017. *Pertama*, pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, sehingga DAU per daerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan pendapatan dalam negeri (PDN) neto. *Kedua*, penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian *output* atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana tambahan infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa.

Program penyaluran Dana Desa pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja di desa.

Foto  
Anas Nur Huda

*Ketiga*, kewenangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, PMK baru juga mengatur penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan DAK fisik dari kabupaten dan kota. Di samping itu, gubernur juga berperan dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK fisik antardaerah, antarbidang, dan antar-DAK dengan pendanaan lainnya.

*Kelima*, pemerintah juga melakukan penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan beberapa indikator tertentu. Indikator-indikator tersebut di antaranya pengelolaan keuangan daerah (*e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-procurement*), pelayanan dasar publik seperti gizi buruk, dan ekonomi kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan. Terakhir, Boediarso menjelaskan tentang upaya pemerintah mengatur peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dengan menganggarkan persentase tertentu dari dana transfer ke daerah yang bersifat umum.

#### **Tri Matra**

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ahmad Erani Yustika menjelaskan pendekatan Tri Matra yang dipakai dalam implementasi Dana Desa. Program penyaluran Dana Desa, menurut Erani, pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja di desa serta diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi nasional secara simultan.

“Sejak tahun pertama implementasi Undang-Undang Desa, kami telah menggunakan pendekatan Tri Matra yang secara langsung menjawab isu ketimpangan dan pengurangan kemiskinan di desa,” kata Erani kepada Media Keuangan pertengahan bulan ini. Matra yang pertama adalah Jaring

Komunitas Wiradesa (Jamu Desa) yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. Matra ini dijalankan khususnya untuk meningkatkan akses pengetahuan dan kesempatan bagi warga miskin serta kelompok marjinal di internal desa.

Matra yang kedua adalah Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa) yang berorientasi pada penguatan akses kepemilikan dan pengelolaan aset produktif di desa oleh masyarakat desa sendiri. “Sehingga potensi ekonomi di desa tidak terserap oleh masyarakat perkotaan,” ujar Erani. Sementara Matra ketiga adalah Lingkar Budaya Desa (Karya Desa) yang mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan tradisi dan budaya lokal yang ada di desa. “Berbagai kebijakan yang ada selama ini telah berbasis pada pendekatan Tri Matra, sehingga dapat menjawab secara komprehensif tentang isu kemiskinan dan ketimpangan di desa,” lanjutnya.

#### **Perbandingan alokasi**

Berdasarkan perhitungan secara makroekonomi, Dana Desa memiliki *multiplier effect* yang besar. Pengalokasian Dana Desa yang semakin besar tiap tahunnya telah memosisikan desa sebagai subyek pembangunan. “Hingga tahun 2016, penyaluran Dana Desa dapat memicu penurunan angka kemiskinan sebesar 1,27 persen,” kata Erani. Data dari Badan Pusat

Statistik pada Oktober 2015 menyebut angka kemiskinan di desa tercatat sebesar 17,89 juta penduduk dan pada September 2016 telah menjadi 17,28 juta penduduk. Selain mendorong penurunan angka kemiskinan, Dana Desa juga berimplikasi terhadap aspek penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Ada dua skema penciptaan lapangan kerja berdasarkan pemanfaatan Dana Desa, yaitu melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Erani, pengalokasian Dana Desa memberikan kesempatan bekerja bagi warga setempat dan mendorong keswadayaan melalui partisipasi aktif, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Dana Desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pada 2015 telah dapat menyerap sedikitnya 1.154.035 orang tenaga kerja dan pada 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 2.477.800 orang. “Angka ini merepresentasikan lapangan kerja yang dihasilkan di desa melalui penggunaan Dana Desa,” ujarnya.

Sementara melalui skema pemberdayaan masyarakat, Dana Desa berkontribusi terhadap terbukanya lapangan kerja melalui pegiat pemberdayaan masyarakat yang pada 2015 sebanyak 29.609 orang. Angkanya meningkat menjadi 136.054 orang pada 2016. Penyerapan tenaga kerja berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daya beli masyarakat desa.

---

## **tahun lalu, Dana Desa yang di-alokasikan dari APBN sebesar Rp46,98 triliun dan tersalurkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp46,90 triliun.**

---

Berkaca pada pengalaman tahun lalu, Dana Desa yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp46,98 triliun dan tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp46,90 triliun. Realisasinya mencapai 99,98 persen. Realisasi tahun lalu jauh lebih baik dibandingkan pada 2015, ketika Dana Desa pertama kali dialokasikan. Dua tahun lalu, dengan alokasi sebesar Rp20,76 triliun, yang berhasil terserap sebesar Rp18,85 triliun atau 91 persen.

Menurut data dari Kemendes PDTT, Dana Desa selama dua tahun ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Rincian pemanfaatan Dana Desa 2016 adalah 81 persen untuk pembangunan infrastruktur; 7,10 persen untuk sarana pemenuhan kebutuhan dasar; 5,9 persen untuk pemberdayaan masyarakat; 2,45 persen untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan 1,7 persen digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi desa. “Sisanya digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pelestarian lingkungan,” kata Erani.

Pembangunan dan pemberdayaan warga dengan pemanfaatan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan Menteri tersebut secara konkret mengarahkan Dana Desa untuk dimanfaatkan kepada pemerataan pembangunan, menekan angka ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan, dan berbasis pada pendekatan Tri Matra. Erani menjelaskan bahwa Kemendes PDTT juga turut berperan agar Dana Desa dapat dioptimalkan melalui empat program prioritas, yaitu produk unggulan desa, badan usaha milik desa, embung desa, dan sarana olahraga desa. “Pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa harus disepakati dalam Musyawarah Desa sebagai forum perumusan kebutuhan desa dan masyarakat desa,” ujar Erani.

#### **Pengawasan bersama**

Ditemui di kantornya di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (20/4), Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lukman Nul Hakim menyampaikan bahwa pemerintah terus

memantau dan menyempurnakan proses pengawasan Dana Desa. Untuk menjaga akuntabilitas Dana Desa, setiap desa diwajibkan untuk membuat laporan Dana Desa dua kali dalam setahun. Laporan Dana Desa itu disusun terpisah dari laporan APB-Desa .

Menurut Lukman, pendampingan terhadap aparat desa dalam pengelolaan transparansi dan akuntabilitas Dana Desa telah dilakukan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tenaga profesional. “Kami juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman untuk inspektorat di setiap kabupaten dalam melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa,” ujar Lukman.

Di samping itu, Kemendagri juga memiliki forum lintas instansi yang di dalamnya antara lain terdapat perwakilan Kemendes-PDPT, Kemenkeu, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan Dana Desa. Forum-forum sosialisasi yang melibatkan aparat desa dan kabupaten juga diselenggarakan.

Upaya-upaya lainnya termasuk mengadakan *training of trainee* yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis kepada aparat desa dan menerima kunjungan konsultasi dari mereka setiap hari kerja. Lukman menjelaskan lebih lanjut, Kemendagri juga mengirimkan pejabat untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus-kasus hukum yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Sejak beberapa tahun terakhir, Kemendagri juga telah membuka layanan *call center* bernama SAPA Kemendagri yang dapat dimanfaatkan untuk berkonsultasi tentang Dana Desa dan melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan. “Kami juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari kementerian dan lembaga lain seperti misalnya Sekretariat Negara,” kata Lukman.

Lukman memberikan catatan bahwa dengan alokasi Dana Desa yang semakin besar, akan lebih baik jika pengawalan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih partisipatif. “Partisipasi dari lembaga-lembaga yang ada di desa, termasuk karang taruna dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pengawasan Dana Desa juga penting,” ujarnya.

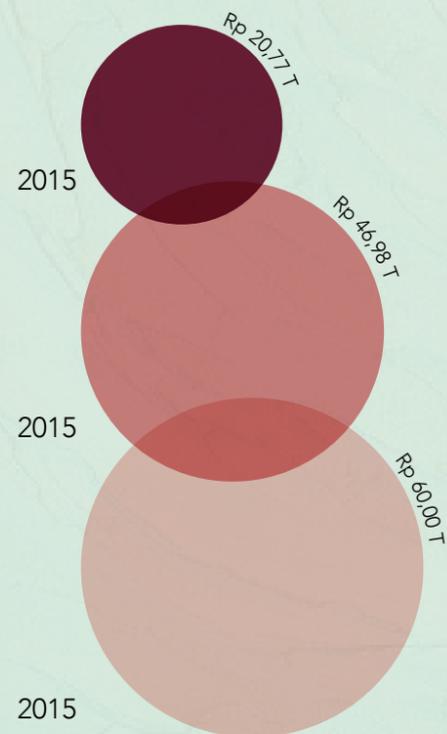
---

**Teks** Dwinanda Ardhi

# Hasil dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017

Pada APBN Tahun Anggaran 2017, alokasi belanja Dana Desa telah menjadi alokasi belanja Dana Desa yang ketiga sejak pertama kali dana ini dikeluarkan di tahun 2015 yang lalu. Penggunaan Dana Desa telah memberikan realisasi pembangunan yang cukup baik di beberapa wilayah perdesaan. Dengan meningkatnya anggaran Dana Desa di dalam APBN 2017, pemerintah semakin selektif dalam membelanjakan Dana Desa ini agar dana tersebut dapat optimal pemanfaatannya bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan prioritas pada beberapa sektor yang perlu dibangun dan ditingkatkan dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

## Alokasi Dana Desa Dalam APBN



## Hasil Pemanfaatan Dana Desa Bidang pembangunan (per 12 Maret 2017)



### Sumber:

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

### Prioritas Pembangunan Desa 2017

Penggunaan Dana Desa 2017 masih ditujukan untuk memberikan daya dorong pertumbuhan ekonomi di daerah, yaitu melalui:

• masyarakat yang bekerja akan mendapatkan upah sehingga daya belinya meningkat,

- masyarakat yang mempunyai bahan baku lokal akan mendapatkan penghasilan,
- infrastruktur dan sarana/prasarana yang terbangun akan bisa meningkatkan produksi pertanian, dan memperlancar distribusi barang.

Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa 2017, dana ini lebih di fokuskan kepada empat bidang pengembangan dan pembangunan, yaitu:

- Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)
- Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Pembangunan Embung Desa
- Pembangunan Sarana Olah Raga Desa

# Desa Berdaya, Desa Sejahtera

Penyaluran Dana Desa yang telah bergulir sejak 2015, kini tengah menunjukkan beberapa hasil. Untuk mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, desa telah diubah dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Tidak hanya itu, untuk memberdayakan potensi desa secara optimal dan berkelanjutan, Dana Desa perlu difokuskan tidak lagi sebatas untuk membangun desa, tetapi lebih diberdayakan agar bisa menjadi desa yang membangun dirinya sendiri. Berikut adalah kisah sukses Gampong Blang Krueng di Aceh dalam membangun desa melalui pendidikan, serta keberhasilan menggerakkan ekonomi masyarakatnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## Desa Sadar Pendidikan

Blang memiliki makna sawah, sedangkan Krueng berarti sungai. Struktur geografis Gampong (sebutan desa di Aceh) Blang Krueng memang terdiri dari ladang persawahan dan sungai yang cukup luas, yakni sebesar 174 hektar. Meski memiliki jarak sepanjang 58 kilometer dari pusat kabupaten, para perangkat Gampong tak patah semangat untuk berkoordinasi dan menjalin hubungan dengan pemerintah daerah serta para pendamping desa yang bertempat di pusat kabupaten.

Cerita kebangkitan Gampong Blang Krueng dimulai sebelum adanya bencana tsunami. Sekretaris Desa Blang Krueng, Teuku Baldisyah, menceritakan bahwa saat itu, Blang Krueng dikenal sebagai daerah konflik pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal itu memperparah kondisi sosial ekonomi

masyarakat yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Saat tsunami melanda pada 26 Desember 2004, segala fasilitas Gampong luluh lantak. Lebih dari 209 korban meninggal. Segala kehidupan masyarakat pun dimulai dari nol kembali. Untuk itu, masyarakat pun sadar untuk segera bangkit dan berbenah. Keuchik (Kepala Desa) Blang Krueng, Teuku Muslem, beserta perangkat desa sadar bahwa modal utama untuk membangun Gampongnya kembali adalah sumber daya manusianya. Untuk itu, mereka sepakat untuk mengutamakan pendidikan sebagai prioritas pertama. Karena letak sekolah untuk anak-anak mereka dirasa cukup jauh, maka disepakati untuk membangun sekolah terdekat dengan dana iuran bersama.

Beruntung Dana Desa digelontorkan pada tahun 2015. Dana itu digunakan untuk menyelesaikan pembangunan sekolah dan sarana infrastruktur dasar pendukung lainnya. Meski tak mencukupi untuk biaya operasional, warga Gampong tetap melakukan sumbangan seikhlasnya demi berlangsungnya kehidupan sekolah. Bagi warga yang tidak mempunyai uang, mereka menyumbangkan tenaga untuk membangun dan melengkapi sarana sekolah.

Yang menarik, posisi Gampong yang diapit oleh

dua universitas besar, menjadikan Gampong Blang Krueng memiliki potensi sumber daya manusia intelektual yang besar. Kedua universitas tersebut yakni Universitas Islam Negeri Ar Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Potensi itu lalu dimanfaatkan oleh Keuchik Muslem untuk melakukan kerja sama pembangunan kapasitas manusia dan program kemasyarakatan dengan pihak universitas. Saat ini, banyak warga desa ataupun desa tetangga yang menyekolahkan anaknya di Blang Krueng. Atas hasil kerja kerasnya, Blang Krueng berhasil dinobatkan sebagai Desa Sadar Pendidikan Kategori Partisipatif oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 2016.

## Desa Inklusi Keuangan

Dengan perbekel (kepala desa di Bali) yang berlatar belakang di bidang perbankan dan asuransi, Desa Tajun di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Bali, berhasil menjadi desa mandiri dengan BUMDes yang maju dan kuat. Sebagai perbekel 2 periode, Kepala Desa Tajun, Gede Ardana, memahami potensi dan kebutuhan desa yang dipimpinnya. Menurutnya, seorang perbekel bukan hanya sekedar pemimpin di desa, namun ia juga seorang manajer yang harus paham tentang fungsi-fungsi manajemen.

Dengan pengalamannya, Ardana berkomitmen untuk mengelola keuangan (APBDes) Desa Tajun dengan prinsip transparan, akuntabel, dan tata kelola yang baik serta sesuai dengan peraturan. Sebelum Dana Desa masuk, pada tahun 2010, Ardana telah memulai unit usaha cikal bakal BUMDes yang hanya bermodal Rp10 juta. Berawal dari satu unit usaha,

kini Desa Tajun telah memiliki lima unit usaha desa dengan omzet yang hampir mencapai Rp16 miliar. Bahkan, BUMDes milik Desa Tajun yang diberi nama Mandala Giri Amerta tersebut berhasil memperoleh penghargaan sebagai BUMDes unggulan pada tahun 2016 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk mendukung perputaran modal di desanya, Ardana membangun Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selain itu, ia juga melakukan kerja sama dengan beberapa *stakeholder* seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selanjutnya, ia juga merencanakan kerja sama dengan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bali. Menurutnya, segala sesuatu yang memudahkan transaksi di desa ini harus segera dikerjakan. Ia mempunyai harapan untuk membangun *smart village*. Dari transaksi keuangan masyarakat, seperti transfer uang, pembelian pulsa, pembayaran listrik dan air, akan mampu menjadi potensi pangsa pasar yang besar untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak lembaga keuangan. Untuk mencapai hal itu, ia perlu untuk membangun jaringan kerja sama yang dimulai dengan membangun *brand* desa yang dipercaya.

## Pengelolaan Dana Desa dan BUMDes

Gampong Blang Krueng memiliki sistem manajemen partisipatif dalam mengelola Dana Desanya. Untuk membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), masyarakat diajak berkumpul bersama di Meunasah (mushola) Gampong. Di tempat itu, Keuchik, Tuha Peut atau Badan

Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga pengontrol, dan warga berembuk bersama untuk merumuskan rencana pembangunan desanya. Hasilnya berupa alokasi anggaran partisipatif yang sumber pendapatannya berasal dari Dana Desa dan hasil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG/BUMDes). Pendapatan yang terkumpul tersebut dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah milik desa, sarana BUMG, jalan desa, serta program pemberdayaan masyarakat seperti sekolah *quran*, pengajian, dan posyandu. Selain itu, belanja desa juga digunakan untuk pengembangan sektor pertanian, pendirian usaha ternak sapi, pelatihan manajemen usaha lokal, serta operasional desa.

Untuk pengelolaan BUMG sendiri, Blang Krueng merupakan salah satu contoh yang sukses dalam mengelola unit usahanya. Setidaknya ada tiga unit BUMG yang memberikan kontribusi besar dalam pendapatan Gampong. Pertama, unit sewa perumahan yang berjumlah sepuluh buah yang cukup laris karena lokasinya strategis, dekat dengan dua universitas besar. Rumah sewa ini memiliki omzet Rp60 juta dalam setahun. Unit kedua yaitu unit usaha air minum isi ulang yang berlokasi di pusat pemerintahan desa. Unit ketiga yaitu unit pengelolaan pertanian serta peternakan serta penggemukan sapi yang menghasilkan pendapatan dari penjualan produk utama dan turunannya.

Tidak kalah dari Blang Krueng, Desa Tajun di Bali juga memiliki BUMDes yang dikelola secara profesional. BUMDes Tajun, Mandala Giri Amerta, memiliki lima unit usaha yang merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Unit usaha pertama adalah unit usaha air bersih yang digunakan untuk memenuhi jaminan sanitasi air bersih dan MCK untuk meningkatkan taraf hidup warganya. Bagi Kepala Desa Tajun, Ardana, ketersediaan air bersih dengan harga yang murah merupakan tugas utama dari pemerintah desa melalui BUMDes-nya. Kedua, unit usaha simpan pinjam yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Kegunaannya, selain untuk menyimpan uang atau mengajukan kredit, juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti transfer uang, membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), serta kebutuhan transaksi keuangan lainnya. Keberadaan dari unit simpan pinjam tersebut diharapkan dapat mendidik masyarakat agar lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Selanjutnya, unit usaha pasar desa. Dengan jarak ke pusat kecamatan atau kabupaten yang cukup jauh, pasar desa merupakan kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan warga desanya. Selain itu, keberadaan empat desa tetangga yang belum tersedia area pasar menjadi potensi tersendiri. Unit keempat adalah unit usaha



sumber daya manusianya. Menurut Gede Ardana, Desa Tajun perlu mempersiapkan tenaga yang memadai untuk mengelola desa. Sebagai contoh, di sektor keuangan BUMDes, untuk mengelola dana yang besar tersebut diperlukan sarjana akuntansi yang terampil. Yang kedua, sosialisasi BUMDes kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Hal tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap tingkat partisipasi dari masyarakat. Terakhir, terkait dengan permodalan. Bagi perbekel, permodalan yang kuat dapat diperoleh apabila BUMDes sudah mendapatkan kepercayaan dari lembaga perbankan.

#### Tantangan pengelolaan Dana Desa

Ke depannya, Blang Krueng memiliki banyak program baru yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Misalnya, pembangunan bank sampah, pembangunan irigasi, penyempurnaan jumlah kelas sekolah yang belum memadai, dan pembebasan tanah desa. Para perangkat desa sadar bahwa ada keterbatasan dari sumber pendapatan Dana Desa dan kemampuan alokasi Dana Desa untuk menggali potensi kekayaan alam desanya. Selain itu, 75 persen potensi lahan di Blang Krueng merupakan lahan pertanian, sehingga perlu dioptimalkan dengan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk mengoptimalkan potensi desa, pendamping desa Blang Krueng, Sofyanuddin, telah melakukan koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi desa serta mendorong promosi potensi desa kepada pihak luar.

Beda desa beda cerita. Di Desa Tajun, kendala yang dialami adalah terkait dengan kapasitas

#### Harapan dari desa

Terkait dengan waktu penyaluran Dana Desa, Keuchik Blang Krueng mengharapkan agar ke depannya dapat lebih dipercepat, sehingga program pembangunan di desa dapat dijalankan secara lebih cepat.

Senada dengan Keuchik Blang Krueng, Perbekel Desa Tajun, Ardana, memiliki harapan agar bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan meningkatkan peranan dari BUMDes. Untuk itu, APBDes harus terus didorong untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dalam arti pembangunan dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Pada akhirnya, kue pembangunan yang merata ini akan menurunkan indeks Gini di desa. "Kalau indeks Gini lebar berarti ada kesenjangan di dalam pembangunan, yang penting sekarang adalah pemerataan pembangunan. Itu tugas BUMDes, tugas APBDes kita," ungkap Ardana.

Teks Abdul Aziz



## Ikut Mengawal Dana ke Desa

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Dana Desa. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, baik dalam penyaluran, penggunaan, pendampingan, maupun pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.

Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan menjelaskan, penggunaan Dana Desa harus mengacu kepada Peraturan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang setiap tahunnya akan menerbitkan peraturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Namun,

Jalan desa, akses menuju sekolah.

Foto Anas Nur Huda

Berbagai bentuk penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat Blang Krueng, Aceh dan Desa Tajun, Bali.

Foto Sularno

"Dengan konsep desa membangun, inisiatif desa harus diutamakan dengan bimbingan dari pemerintah."

Lalu Hendry Yujana  
Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

dalam pelaksanaannya masih ada penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.

Selain itu, Ubaidi melihat masih ada beberapa kendala lain. Misalnya, pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya swakelola dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga atau penyedia jasa, pemungutan dan penyeteroran pajak atas pekerjaan yang didanai dengan Dana Desa tidak sesuai ketentuan perpajakan, bahkan ada Dana Desa yang digunakan untuk mendanai belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDDes. Sebab itu, bimbingan dan evaluasi desa menjadi sangat krusial.

#### Menguatkan Aparatur Desa

Lalu Hendry Yujana, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) mengatakan, saat ini pemerintah menekankan pada konsep Desa Membangun bukan Membangun Desa. Dua konsep ini sangat berbeda. Desa membangun, pintu masuknya adalah desa bukan perdesaan. Pendekatannya *locus* bukan fungsional. Tingkatannya *local development* bukan *rural development*. Konsepnya kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, alokasi dana, gerakan lokal, dan pemberdayaan. Skalanya adalah yurisdiksi desa bukan kawasan ruang lintas desa. Pemegang kewenangan Pemerintah Desa dan masyarakat bukan Pemerintah Daerah. "Dengan konsep desa membangun, inisiatif desa harus diutamakan dengan bimbingan dari pemerintah," ujar Lalu.

Dijelaskan Lalu lebih lanjut, segera setelah Undang-Undang Desa disahkan pada 2014, Pusdiklat KNPK mulai melakukan pendalaman untuk memahami semangat arah pengelolaan dan pembangunan desa. "Kami melakukan seminar-seminar di beberapa provinsi khusus tentang pengelolaan keuangan, aset dan BUMDesa. Semuanya untuk diseminasi kebijakan sekaligus menangkap aspirasi dari desa secara langsung," kata Lalu.

Dari rangkaian seminar-seminar ini, Pusdiklat KNPK kemudian mengembangkan kurikulum serta bahan ajar khusus untuk aparat desa, termasuk latihan bagi calon pelatih. "Kendala kita masih selalu soal pembiayaan yang terbatas, sementara animonya luar biasa besar, penting dan mendesak pula. Kalau setiap desa memerlukan lima aparat untuk dilatih, maka

berarti perlu melatih sebanyak 374.770 orang dan sebaiknya tuntas sebelum 2019," tukas Lalu.

#### Mengawasi Dana Desa

Lukman Nul Hakim, Direktur Keuangan pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri mengatakan, terkait supervisi desa ada dua jenis pendampingan. Pertama, pendampingan teknis oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedua, dapat ditambah dengan pendamping profesional yang direkrut oleh Kementerian Desa.

Diakui Lukman, meski sudah mengalami kemajuan, namun kedua pendampingan ini masih belum optimal. SOPD dan Kecamatan masih perlu didorong untuk memberikan bimbingan teknis serta mengevaluasi APBDDes. Sementara itu, pendamping profesional juga masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Apalagi, saat ini distribusi dan rasio pendamping desa masih jauh dari ideal. Satu pendamping bisa menangani hingga tiga desa yang luas wilayahnya cukup besar. "Adapula pendamping yang bukan penduduk lokal, atau pendamping tersebut tidak betah," jelas Lukman.

Ditanya mengenai pengawasan, Lukman mengatakan Rancangan APBDDes sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa harus disupervisi dan dievaluasi oleh Bupati melalui Camat. Kendalanya, masih banyak Camat yang belum bisa memberikan pemahaman kepada aparat desa mengenai pengelolaan keuangan. Baik dari sisi aturan, prosedur, format, maupun kriterianya. "Dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa, kalau menunggu dari pusat, sampai 10 tahun pun tidak akan terjangkau," katanya.

Untuk pengawasan dalam konteks audit, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur. Namun, konvensi saat ini menyepakati audit dilakukan oleh inspektorat Kabupaten/Kota. Audit ini juga masih perlu diperkuat mengingat banyaknya keterbatasan seperti keterbatasan kapasitas personil dan anggaran sehingga belum mampu menjangkau semua desa. "Audit *kan* harus melihat kondisi di lapangan dan keseluruhan transaksi. Kalau masih berupa prediksi atau *sampling*, apa iya bisa merepresentasikan keseluruhan desa? Ini yang harus segera kita perbaiki ke depan," tutup Lukman.

Teks Irma Kesuma



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo

Foto Tubagus P.

## Dana Desa untuk Kurangi Kesenjangan

Pemerintah daerah kini dituntut untuk berlomba-lomba dalam memanfaatkan Dana Desa. Mekanisme pengelolaan telah diperbaiki demi menjadikan desa semakin berdaya.

Pemerintah memiliki catatan penting terhadap kegiatan penyaluran Dana Desa tahun 2016. Upaya untuk mempercepat pembangunan desa demi kesejahteraan seluruh rakyat lebih dioptimalkan di tahun 2017. Salah satunya dengan adanya Surat Keputusan Bersama Empat Menteri dan diterbitkannya PMK No. 50/PMK.07/2017. Berikut penjelasan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam *Press Briefing* Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Kamis (13/4) di Kementerian Keuangan, Jakarta.

**Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun. Bagaimana sinergi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan beserta kementerian terkait lainnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa?**

Pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Keempat kementerian

tersebut antara lain Kementerian Keuangan; Kementerian Desa; Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Penambahan Menteri PPN/Bappenas ini agar proses perencanaan Dana Desa menjadi lebih sinkron. Substansi sudah selesai di-review, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditetapkan.

Selain SKB itu ada yg lebih *urgent* untuk disampaikan yaitu terbitnya PMK No. 50/PMK.07.2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kebijakan ini penting dan mendesak karena ada sejumlah perubahan yang fundamental dalam pengelolaan TKDD. PMK No. 50 ini adalah penyempurnaan dari PMK sebelumnya, yaitu PMK No. 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

#### Apa yang melatarbelakangi transformasi pengelolaan TKDD?

Transformasi TKDD ini merupakan kelanjutan dari reformasi kebijakan. Ada lima alasan penting mengapa kebijakan ini perlu ditransformasi. Pertama, anggaran TKDD meningkat setiap tahunnya. Bahkan sejak diluncurkan dari tahun 2001, TKDD telah meningkat sembilan kali lipat, bahkan sudah melampaui anggaran kementerian/lembaga (K/L). Ini membuktikan kuatnya komitmen pemerintah untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Kedua, efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD perlu lebih diperkuat dalam rangka mengatasi kesenjangan daerah. Ketiga, mekanisme TKDD harus diperbaiki dengan mendasarkan pada kinerja penyerapan dan kinerja pencapaian *output*.

Mengapa hal ini perlu diperbaiki? Selama ini Dana Desa disalurkan tanpa syarat, kebijakan ini tidak mendidik pemerintah daerah. Padahal dana yang disalurkan bersumber dari utang pemerintah yang wajib dibayar beserta bunganya. Penyaluran tahap berikutnya akan bergantung pada penyaluran tahap sebelumnya dan realisasi program kegiatan.

Keempat, kualitas belanja infrastruktur di daerah harus lebih ditingkatkan melalui TKDD. Kelima,

perlu adanya komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas secara konsisten.

#### Apakah TKDD sudah dikelola secara akuntabel?

Mungkin sudah sebagian, namun belum optimal. Saat ini anggaran TKDD sekitar Rp764,9 triliun, sedangkan belanja K/L Rp763,6 triliun. Faktanya, kesenjangan masih lebar. Pendapatan perkapita DKI Jakarta sekitar Rp 109 juta, sedangkan pendapatan perkapita di Maluku Utara sekitar Rp5,1 juta. Selain itu, rasio gini Indonesia masih berada di kisaran 0,397. Meskipun sudah mulai menurun sejak 2014, namun jurang ketimpangan masih lebar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan transformasi kebijakan.

#### Apa kebijakan pemerintah terkait penyaluran TKDD di tahun 2017?

Pertama, pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis. Jadi besaran DAU perdaerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. Kedua, penyaluran TKDD didasarkan pada penyerapan dan capaian *output* penggunaan TKDD tahap sebelumnya. Ketiga, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa mulai tahun ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang berjumlah 171 KPPN.

Keempat, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat di daerah dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan DAK Fisik dari kabupaten/kota. Kelima, penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Keenam, peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan.

#### Apa saja yang harus menjadi perhatian pemda terhadap pengalokasian DAU tahun ini?

Pertama, pemda wajib mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun selama ini ada perubahan APBD. Suka tidak suka, kebijakan baru ini mengharuskan pemda untuk mengubah APBD. Selama ini, mayoritas daerah menggantungkan pada DAU, kecuali DKI Jakarta. Maka, naik turunnya DAU harus diikuti dengan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam APBD. Kedua, Pemda perlu melakukan identifikasi apa saja kegiatan yang mendesak, penting, dan bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Untuk jangka panjang, pertama, pemda perlu menata kembali jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kedua, memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ketiga, memperkuat sumber pembiayaan, bisa melalui pinjaman daerah dengan bunga rendah.

Teks Pradany Hayyu



Foto  
Dok. Biro KLI

Bertempat di Aula Gedung Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum kepada seluruh mahasiswa PKN STAN pada Senin (17/04). Kuliah umum dengan judul *Ministry Talks: motivating, inspiring and empowering* ini dibuka oleh sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Astera Primanto Bhakti.

Memberikan kuliah di PKN STAN menjadi istimewa karena keinginan tersebut muncul sendiri dari Menkeu. "Banyak kampus yang meminta saya mengisi kuliah umum, tapi STAN satu-satunya yang saya minta datang. Karena saya percaya mahasiswa dan dosen STAN adalah pihak yang berperan penting dalam menentukan masa depan bangsa," kata Menkeu. Antusiasme peserta, yang mayoritas dosen dan mahasiswa PKN STAN, telah terlihat sebelum acara berlangsung. Total mahasiswa yang mengikuti kuliah umum tersebut berjumlah 9.148 orang, tersebar dari beberapa lokasi di Indonesia.

Dalam paparannya, Menkeu juga menjelaskan tentang kondisi perkembangan perekonomian terkini. Untuk menghadapi kondisi serta tantangan hari ini dan ke depan, maka manusia harus menjadi bagian dari aset. "Kalau Anda tidak mendapatkan investasi dari kecil, maka manusia itu akan

## Menkeu Berikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa STAN

tumbuh, tapi dia tidak akan menjadi bagian dari aset negara karena dia tidak memiliki kemampuan untuk produktif dan inovatif", jelas Menkeu.

Menkeu berharap kepada seluruh mahasiswa STAN dapat menggambarkan satu karakter generasi muda yang betul-betul haus akan ilmu pengetahuan. "Anda adalah tunas muda untuk mengelola dan menjaga keuangan negara, Anda harus memiliki ambisi yang luar biasa, jangan pernah menjadi orang yang sekadarnya," kata Menkeu. Mahasiswa STAN merupakan calon pegawai di Kemenkeu, sehingga Menkeu juga mengingatkan bahwa seluruh mahasiswa STAN memiliki hutang kepada Negara. Oleh sebab itu, mahasiswa STAN wajib memiliki pemahaman terkait perkembangan ekonomi negara melebihi mahasiswa lain.

Teks Dewi Rusmayanti



Foto  
Dok. Biro KLI

## PMK Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Direvisi

**K**ementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyelenggarakan *Press Briefing* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Kamis (13/04) di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarmo Teguh Widodo, PMK ini merupakan revisi dari PMK nomor 187 /PMK.07/2016.

Revisi atas kebijakan TKDD perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD. Sehingga pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. "PMK ini perlu diterbitkan karena saat ini kita sedang transformasi kebijakan pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, sebagai kelanjutan reformasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa," jelasnya.

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD dalam mengatasi kesenjangan antardaerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN. Selain itu, juga untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana transfer dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dana dan ketercapaian *output* untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur di daerah melalui optimalisasi penggunaan dana transfer dan Dana Desa, serta melaksanakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Pada kegiatan tersebut juga dijelaskan bahwa Pagu Dana Desa tahap I tahun anggaran 2017 adalah sebesar 60 persen atau Rp 36 triliun. Sedangkan penyaluran tahap I baru sebesar 36 persen atau Rp13,2 triliun, yang artinya masih tersisa Rp22,9 triliun. Hal ini disebabkan masih adanya desa yang belum memenuhi syarat pencairan Dana Desa.

Teks Dewi Rusmayanti



## Kekayaan Laut Indonesia di Kepulauan Seribu

**A**da kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Pada pertemuan Kelompok Kerja ASEAN tentang Konservasi Alam dan Keanekaragaman Hayati pada Maret 2017 lalu di Brunei Darussalam, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNLKS) dinobatkan sebagai Taman Warisan ASEAN. Hal ini berarti TNLKS akan menjadi kawasan prioritas ASEAN untuk dilindungi. Ditemui di kantornya, Evi Haerlina, Kepala Balai TNLKS berbagi sedikit cerita mengenai perairan yang dicintainya ini. Berikut petikannya.

**Seperti apa gambaran umum biota laut di TNLKS?**

Kepulauan Seribu memiliki 4 ekosistem yakni ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan laguna, serta pantai dan vegetasi pantai. Terumbu karang di Kepulauan Seribu cukup banyak, terdiri dari 68 *genus* dari 19 *family* yang didominasi oleh *acroporidae*,

Foto  
Resha Aditya  
Pratama



Foto  
Adi Kurniawan

*poritidae, faviidae, fungiidae, dan agariciidae.*

Kita juga mempunyai 195 spesies ikan dan 15 jenis bakau yang didominasi oleh *rhizophora stylosa*. Luas ekosistem bakau memang tidak terlalu besar, hanya sekitar 36 hektar dan menyebar di 12 pulau. Beberapa di antaranya merupakan hasil rehabilitasi, penanaman oleh wisatawan, serta program *Corporate Social Responsibility* oleh sejumlah perusahaan.

Nah, pengelolaan Taman Nasional ini didasarkan oleh 4 zonasi yakni zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan I, dan zona pemanfaatan II. Zona inti dikhususkan untuk perlindungan habitat penyu sisik, terumbu karang, dan bakau. Kita punya 3 zona inti yang memang disitu tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Zona perlindungan diperuntukkan bagi pendidikan, penelitian, dan penunjang budi daya. Sementara, zona pemanfaatan I dan II untuk aktivitas pariwisata, selain juga khusus untuk pemukiman penduduk.

**Siapa saja yang biasanya memanfaatkan zona inti?**

Kebanyakan yang melakukan penelitian di zona inti adalah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Biasanya mereka melakukan penelitian terkait terumbu karang dan bakau. Selain itu, ada juga pelajar dan mahasiswa yang datang dalam kegiatan pendidikan. Umumnya, mereka belajar mengenali seluk beluk manfaat ekosistem bakau.

Berbagai lembaga juga sering datang kemari untuk melakukan riset. Misalnya dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Untuk dapat masuk ke zona inti, pengunjung harus dilengkapi dengan surat ijin masuk kawasan konservasi (Simaksi) yang dikeluarkan oleh Balai TNLKS. Mereka harus mengajukan proposal dan surat pengantar dari

lembaga masing-masing. Untuk mahasiswa, biasanya mereka akan presentasi terlebih dahulu, apa yang akan mereka lakukan di zona inti. Dari situ, kita bisa saling berbagi informasi dan bekerja sama. Baik dari sisi kegiatan, pendanaan, maupun pencarian data. Penelitian juga boleh dilakukan di zona pemanfaatan. Setiap 2 tahun sekali kami *kan* melakukan kegiatan monitoring dan inventarisasi terumbu karang dan padang lamun. Jadi kita bisa mendapatkan datanya bersama-sama dengan saling membantu.

**Seperti apa kesadaran penduduk dalam menjaga lingkungan sekitar?**

Kalau ekosistem Kepulauan Seribu rusak, maka fisik perairannya juga rusak. Akibatnya kegiatan pariwisata pasti berkurang, begitu juga aktivitas perikanan oleh nelayan. Sebab itu, kami melarang nelayan untuk menangkap ikan dengan pengeboman atau kompresor. Kalau ikan berkurang, tentu penduduk

sendiri yang rugi karena pemenuhan nutrisinya berkurang. Untunglah, saat ini sebagian besar penduduk Kepulauan Seribu sudah tahu bagaimana menjaga ekosistem sekitar. Setiap tahun ada penyuluhan pentingnya konservasi, termasuk di sekolah-sekolah.

**Bagaimana memberdayakan warga sekitar agar mandiri secara ekonomi?**

Kami selalu melibatkan mereka. Misalnya dalam pengelolaan sampah yang bisa didaur ulang. Kami juga mengajak nelayan melakukan transplantasi bakau serta melibatkan penduduk untuk menjadi pemandu wisata. Selain itu, kami membantu pembinaan penduduk untuk membuat produk olahan ikan, menanam sayuran hidroponik, atau pembibitan bakau. Untuk keperluan edukasi, seperti pembuatan film, kami juga selalu mengajak penduduk setempat. Dari situ semua *kan* bisa menjadi sumber pendapatan mereka.

**Seperti apa efek meningkatnya kunjungan wisata terhadap konservasi?**

Pemandu wisata membantu kami untuk memberi pemahaman dan peringatan kepada pengunjung. Misalnya, kalau mau menyelam harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Penyelam tidak boleh memegang apalagi memotong dan mengambil karang. Sirip selam yang digunakan juga jangan sampai membentur karang. Sejak awal, sebelum penyelaman dilakukan, kami juga memberi peringatan untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan agar tidak mengotori laut.

Nantinya, kami juga akan menghitung daya dukung TNLKS yang dibolehkan untuk pariwisata. Jadi tidak sembarangan. Keluar masuk wisatawan

yang diperkenankan harus diatur agar tidak membebani daya dukung. Apalagi sekarang cukup banyak wisatawan lokal yang datang berkunjung karena Kepulauan Seribu dekat sekali dengan Jakarta.

**Bagaimana memenuhi kebutuhan air tawar untuk pariwisata?**

Sumber air tawar cukup bagus, terutama di Pulau Pramuka. Tetapi memang terbatas untuk mandi, cuci, kakus saja. Untuk air minum masih harus dipenuhi dari Pulau Jawa karena makin ke utara air tawarnya semakin sedikit. Penduduk setempat masih tergantung kepada tadahan air hujan. Kami sudah mencoba menghitung investasi peralatan pengolahan air tawar. Ternyata hasilnya masih mahal, mendingan langsung beli air minum galonan saja di Jakarta.

Sekarang ini mulai ada penurunan daratan Pulau Pramuka. Sama seperti di Jakarta, semua orang menggali tanah sehingga tinggi permukaan tanah semakin turun. Semakin banyak galian ke bawah, dengan sendirinya air laut semakin masuk. Kalau dulu, kadar air tawar di Pulau Pramuka masih 90 persen, tetapi kini hanya 70 persen karena makin banyak air laut yang masuk.

**Bagaimana cara mudah menuju Kepulauan Seribu?**

Sebenarnya, transportasi dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu tidak terlalu mahal. Kalau mau nyaman, bisa berangkat pakai kapal cepat dari Pantai Marina Ancol. Kalau mau lebih murah, bisa berangkat pakai kapal kayu dari Dermaga Kali Adem di Jakarta Utara. Dermaganya sudah bagus, ada ruang tunggu untuk penumpang. Hanya saja akses menuju ke sana memang masih kurang nyaman

karena banyak penduduk setempat menjemur ikan asin di tepi jalan. Kalau untuk turis mancanegara, kondisi seperti itu memang belum memadai. Kalau begitu, ya bisa lewat Marina saja.

**Sebagai taman warisan ASEAN, dukungan apa yang akan diperoleh?**

Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN akan membantu kami dalam pengelolaan taman nasional. Jika kami membutuhkan sesuatu, mereka yang akan menyiapkan. Jadi, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu akan diberi dukungan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk dana. Selain itu, kami juga akan saling berbagi ilmu. Dengan begitu, pelaksanaan program-program penelitian dan pengembangan di kawasan bisa dioptimalkan.

**Seperti apa rencana pengelolaan TNLKS ke depan?**

Pertama, kami berencana mengembangkan basis data 10 sumber daya penting (SDP). Adapun SDP tersebut terdiri dari tumbuhan hutan pantai, bakau, padang lamun, terumbu karang, *mollusca*, ikan ekonomis penting, penyu sisik, mamalia laut, elang bondol dan burung air. Kedua, harmonisasi pengelolaan dengan Pemerintah Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Ketiga, meningkatkan sarana pariwisata alam untuk mendukung Kepulauan Seribu sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Rencananya, pembangunan sarana dan prasarana tersebut akan melibatkan peran investor melalui mekanisme Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA).

**Teks** Irma Kesuma Dewi

# Menuai Prestasi dari Tanah Poso

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, Direktorat Jenderal Pajak

Dahulu, pegawai yang “di-Poso-kan” memiliki konotasi negatif. Kini, prestasi penerimaan pajak tertinggi justru berasal dari daerah konflik ini.



Gedung KPP Pratama Poso

Mendengar sekelumit cerita Friday Glorianto mengenai Poso memang membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, bila kaki kita melangkah keluar kantor yang ditemui adalah pemandangan mayat manusia bergelimpangan. Namun itu dulu. Poso saat ini jauh lebih aman, meskipun masih digelayuti konflik horizontal. Siapa sangka, kota yang penuh dengan aksi teror ini mampu mencapai target penerimaan pajak seperti yang diharapkan.

Friday, sapaan akrabnya, mengenakan kemaja putih dihiasi senyum ramahnya saat menyambut Media Keuangan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso itu berbincang diiringi gelak tawa seolah menyiratkan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan bila bertandang ke Poso. Benar saja, hampir seluruh pegawai di kantor tersebut bukanlah warga asli Poso. Sebagian berasal dari Palu dan sebagian lagi terpaksa harus meninggalkan keluarga di pulau Jawa. Itulah yang membuat para pegawai tampak dekat dan akrab.

KPP Pratama Poso berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil Sulutenggo dan Malut). Dengan kondisi geografis yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan, wilayah kerja KPP Pratama Poso mencakup empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, dan Morowali.

Meskipun hanya setingkat kabupaten, jangan dibayangkan Poso memiliki wilayah yang sempit. Kabupaten Poso sendiri memiliki luas 8.712,25 km<sup>2</sup> atau 10 kali lebih luas dari daratan Jakarta. Belum lagi dengan tiga kabupaten lainnya yang secara total memiliki luas 28.000 km<sup>2</sup> atau 450 kali luas daratan Jakarta. Dengan luas wilayah kerja sedemikian rupa, KPP Pratama Poso hanya dipunggawai sebanyak 56 pegawai. “Di sini hanya ada satu pegawai perempuan dan hanya ada satu pegawai kelahiran Poso,” ujar Friday yang menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Poso sejak tahun 2015.

Friday beserta jajaran berupaya memberikan kinerja terbaik demi meningkatkan penerimaan pajak. Fokus utama KPP Pratama Poso adalah dengan penggalian potensi Wajib Pajak di empat kabupaten. Secara umum, penerimaan

kantor yang berlokasi di Jalan Pulau Kalimantan No. 23 ini terbagi dalam dua sektor besar. Pertama, sektor pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 59,28 persen. Kedua, penerimaan dari sektor swasta sekitar 40,72 persen.

## Wilayah luas dan rawan konflik

Layaknya KPP lainnya yang memiliki cakupan wilayah kerja lebih dari satu kabupaten, KPP Pratama Poso dibantu oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bungku. KP2KP Bungku membawahi Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Bungku merupakan ibukota Kabupaten Morowali. Jauh dari hingar bingar perkotaan, Bungku menyimpan potensi pertambangan nikel, chromite (bahan baku *stainless*), dan batu gamping. Tak heran bila Kabupaten Morowali dinyatakan sebagai kabupaten terkaya di Sulawesi Tengah. Itulah alasan mengapa Bungku dipilih sebagai lokasi berdirinya KP2KP.

Jarak yang jauh dalam menjangkau Wajib Pajak menjadi salah satu kendala



Pegawai KPP Pratama Poso sedang membantu pengisian e-filing anggota TNI

KPP Pratama Poso. Bahkan ada Wajib Pajak yang harus menempuh perjalanan ke kantor dengan tiga jam perjalanan kapal lalu disambung dengan 13 jam perjalanan darat. Untuk meminimalisir kendala tersebut, KPP Pratama Poso mengoptimalkan layanan SMS (*short message services*) Billing. Dengan adanya SMS Billing, Wajib Pajak bisa membuat ID (*identity*) Billing melalui SMS. Setelah mendapatkan ID Billing, pembayaran pajak tinggal dilakukan di bank atau kantor pos terdekat, tak perlu harus jauh-jauh ke kantor pajak.

Nama Poso memang identik dengan

kawasan rawan aksi jaringan terorisme Indonesia. Salah satu tersangka kasus terorisme yang menjadi buronan aparat beberapa tahun terakhir, Santoso, memang telah meninggal. Namun ketenangan masyarakat seolah kembali terusik dengan adanya ledakan bom di depan pasar lama Poso pada 31 Maret 2017. Diduga ideologi teroris masih tersebar di Poso. Dengan kondisi tersebut, perekonomian Poso bisa dikatakan tidak ada pertumbuhan berarti.

## KPP berprestasi

Di tengah kondisi rawan tersebut, kinerja KPP Pratama Poso patut diacungi jempol. Dalam dua tahun terakhir, KPP Pratama Poso mampu mencapai target penerimaan pajak. Pada tahun 2016, pencapaian penerimaan sebelum adanya revisi target mencapai 99,77 persen, sedangkan pencapaian setelah revisi target sebesar 102 persen (kantor pusat menetapkan target 85,27 persen). Lebih dahsyat lagi, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 juga berhasil melampaui target, yaitu dengan pencapaian 112,31 persen. Dengan pencapaian tersebut, pada tahun 2015 KPP Pratama Poso mencatatkan prestasi ke dalam ranking



Friday Glorianto, Kepala KPP Pratama Poso

Foto  
Anas Nur Huda

10 besar KPP se-Indonesia dengan kinerja penerimaan terbaik.

Bahkan hingga 31 Maret 2017, portal DJP mencatat KPP Pratama Poso menempati peringkat pertama nasional, yaitu 39,69 persen dari target. Kini tak ada lagi istilah pegawai DJP yang ‘di-Poso-kan’ atau dibuang ke Poso. Dahulu, Poso memang terkenal dengan tempat ‘buangan’ bagi pegawai berkinerja buruk. Kini anggapan itu sepenuhnya salah. KPP Pratama Poso telah menjadi salah satu KPP terbaik di tingkat nasional.

Pencapaian KPP Pratama Poso tak lepas dari upaya yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan *stakeholders*. Selain aktif melakukan layanan ‘jemput bola’ kepada para Wajib Pajak, KPP Pratama Poso juga aktif melakukan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Selain itu, KPP Pratama juga secara khusus memberikan pelatihan kepada para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyosialisasikan pengisian *e-filing*.

Di tengah kondisi perekonomian yang tidak terlalu baik, KPP Pratama Poso tetap mengapresiasi antusiasme Wajib Pajak dalam mengikuti program Amnesti Pajak (*tax amnesty*). KPP Pratama Poso melakukan jemput bola untuk membuka pelayanan Amnesti Pajak di salah satu kantor pembantu, yaitu Pos Pembantu Ampana. Dengan kurang lebih 526 Wajib Pajak yang mengikuti program tersebut dan uang tebusan mencapai Rp9 Miliar. Bisa dikatakan, jajaran KPP Pratama Poso telah berhasil memberikan contoh yang baik dengan terus berprestasi di tengah keterbatasan.

Teks Pradany Hayyu



Foto  
Dok. Pribadi

## Puisi Bernas Sang Pekerja Keras

*Perubahan seperti arus sungai yang deras  
Hanya ikan mati yang hanyut terbawa arus*

*Dulu sulit menyangka orang bisa berubah  
Dari cara-cara yang rumit menjadi mudah  
Dari meja ke meja, menjadi layanan satu pintu  
Kata-kata puji dan puastlah yang diucap selalu*

*Tapi tak pernah ada kata puas untuk inovasi  
Tak pernah ada kata berhenti untuk memanusiakan manusia*

**B**ait sajak penuh makna tersebut merupakan salah satu puisi favorit dari sosok Haryana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ia membawakan sajak reformasi tersebut pada salah satu kegiatan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tema Puisi Anak Negeri Lintas Generasi.

Berbeda dengan hobi sebagian besar temannya, Haryana lebih memilih berpuisi sebagai salah satu keahliannya. Tak memiliki nada suara yang bagus

menjadi awal mula ia memilih membaca sajak. Namun berkat hal itu, Haryana menjadi dikenal sebagai aktivis koordinator perlombaan membaca puisi sejak di kampus. Pada peringatan Hari Oeang, ia pernah mengadakan kegiatan membaca puisi digabung dengan alunan musik yang dikenal dengan musikalisasi puisi.

Dalam rangka memeriahkan penjurian puisi, Haryana mengundang beberapa penyair legendaris seperti Taufik Ismail dan Slamet Sukirnantoro. Ia juga pernah belajar lebih dalam terkait puisi kepada beberapa temannya di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Dari situ, Haryana semakin terkenal dan sering melakukan kerja sama dengan IKJ untuk menjaring orang-orang yang memiliki bakat berpuisi. Dalam mengoordinasikan perlombaan

puisi, Haryana selalu mengambil tema terbaru dan ia kaitkan dengan perayaan pada bulan tertentu. Misalnya, pada bulan Desember, ia mengangkat tema yang memuliakan seorang Ibu karena pada bulan tersebut bertepatan dengan Hari Ibu.

Terkait minatnya dengan puisi, menurut Haryana, di dalam puisi terdapat perpaduan antara imajinasi, penghayatan, dan pesan. Tidak setiap orang mau meluangkan waktu untuk membaca puisi dan menerjemahkannya dalam bahasa sehari-hari. Puisi, bagi Haryana, merupakan ringkasan keinginan atau impian seseorang untuk suatu hal yang baru. Puisi itu pasti memberikan pesan-pesan moral kepada orang untuk melakukan sesuatu hal. Tugas dari penyair adalah menyampaikan pesan-pesan tersebut dalam bahasa sastra yang sesingkat mungkin.

#### Menjelajah bumi nusantara

Mencicipi perjuangan melewati banyak kota dalam perjalanan kariernya tidak membuatnya patah semangat untuk mengabdikan pada bangsa dan negara. Bertemu orang-orang baru dan tugas-tugas baru menjadi sebuah pembelajaran berharga dalam membentuk jati dirinya. Tak luput dari hal tersebut, keluarga pun ikut merasakan susahnyanya harus berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Sosok abdi negara itu bernama Haryana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB). Bersama istri dan anaknya, ia sudah makan garam menjelajah bumi nusantara.

Haryana ditugaskan untuk pertama kali di kantor pusat DJPB Jakarta. Setelah itu, ia dipindahkan ke Denpasar. Tak lama berselang, ia pun kembali ke pusat. Dari pusat, ia lalu menjajal Kalimantan dan daerah timur seperti Maluku, kemudian ke Samarinda dan kembali lagi kantor ke pusat. Bertugas di Kalimantan sebagai kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah hal yang paling

berkesan baginya. Meski memimpin KPPN termasuk hal yang baru, ia berhasil memimpin kantor tersebut dengan baik. Ia berhasil menjalankan program reformasi birokrasi yang menjadi mandat dari kantor pusat, padahal program tersebut baru pertama kali diterapkan di kantor tersebut.

Tidak hanya itu, cerita yang menarik lagi adalah ketika Haryana juga ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah Kalimantan. Pada waktu itu, ia berhasil membangun komunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Sebagai Kepala Perwakilan, ia memiliki inisiatif untuk menjalankan acara bakti sosial Kemenkeu berupa sunatan massal. Dengan dukungan Bupati kala itu, acara berlangsung cukup meriah dan efektif, bahkan sampai menjangkau daerah terpencil seperti di kaki gunung dan desa-desa. Warga yang tidak mampu cukup membawa apa yang mereka punya seperti kelapa, telur, sarung, dan sebagainya untuk diberikan kepada para petugas dan dokter sebagai bentuk terima kasih. Haryana yakin dengan kegiatan berdampak sosial seperti itu, bukan hanya akan meningkatkan hubungan yang baik antara Kemenkeu dengan masyarakat di daerah, namun juga untuk berbagi makna kebahagiaan.

#### Mengelola birokrasi vertikal

Membangun tata kelola yang baik merupakan visi besar Kementerian Keuangan yang telah tertuang dalam *grand design* Transformasi Kelembagaan. Untuk itu, Haryana berkomitmen mengimplementasikan hal tersebut dalam unit kerjanya. Menurutnya, para pegawai di unit teknis merupakan ujung tombak dari Kemenkeu. Selain itu, dukungan dari pimpinan juga diperlukan dalam rangka ikut mendorong setiap insan Kemenkeu mewujudkan *good governance*.

Terkait institusi eselon I yang dikelolanya, melalui peran Sekretaris, Haryana juga berkomitmen untuk mendorong dan mendukung kantor

vertikal di daerah seperti Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan DJPB atau KPPN untuk memperoleh standar ISO sebagai standar internasional untuk pelayanan. Hal tersebut merupakan tantangan baginya karena sebagai pengelola di Kantor Pusat, ia harus mampu memberikan petunjuk dan arahan kepada kantor-kantor vertikal untuk mendapatkan sertifikat ISO. Di sisi lain, ia juga turut turun ke lapangan dalam memberikan arahan dan dukungan kepada kantor-kantor yang sedang mengikuti penilaian. “Jadi tetap kita (kantor Pusat) memberikan dorongan dan beberapa fasilitas supaya kantor vertikal ini benar-benar siap. (Karena) bagaimanapun juga kantor ini juga mewakili Ditjen Perbendaharaan. Jadi kita tetap memberikan dukungan kepada kantor-kantor kita yang ada di daerah,” jelasnya.

#### Makna disiplin dan kerja keras

Semenjak kecil, anak dari Semen Somodiharjo dan Djumi Somodiharjo ini sudah ditanamkan nilai-nilai pekerja keras dan disiplin. Sebagai anak tertua dari 6 bersaudara, ia merasa bersyukur telah mampu membantu kedua orang tuanya untuk membesarkan diri dan saudaranya sampai semuanya mapan dan berkeluarga. Ayahnya merupakan sosok tegas yang selalu memberi contoh untuk disiplin bangun di pagi hari. Pesan yang masih melekat dari sang ayah adalah agar jangan sampai bangun sebelum ayam berkokok. Seperti kata pepatah Jawa, kalau sampai bangun didahului ayam, nanti rejekinya bisa dipatok ayam. Walaupun awalnya merasa kesulitan, lama-kelamaan ia terbiasa untuk bangun pagi hingga sekarang.

Selain itu, Haryana juga dididik untuk senantiasa bekerja semaksimal mungkin. Hal itu hanya dapat dicapai dengan bekerja keras. Karena itulah kerja keras hanya bisa muncul apabila kita sendiri yang melakukannya. Ayah Haryana juga selalu mengingatkan agar dalam bekerja itu harus selalu berhati-hati. Menurutnya,



Mendukung UMKM, Haryana mengunjungi salah satu tempat pengolahan kopi Lanang Lerek Gunung Gembongsari, Kabupaten Banyuwangi.

Foto Tino Adi

hati-hati tersebut memiliki makna yang luas. Dalam bekerja, ia menyarankan agar selalu mempertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### Mewariskan nilai

Di sisi lain, Haryana bersama istrinya, Prasdiyati, telah dikaruniai tiga anak, Banuaji Setiawan, Fauzan Kurniawan, dan Anisa Hana Syafiyah. Kepada anak-anaknya, Haryana berkomitmen untuk meneruskan nilai disiplin dari kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, ia juga mendidik anak-anaknya dengan nilai kerja keras. Ia bersyukur hasil jerih payahnya membuahkan hasil dengan prestasi yang cemerlang dari ketiga anaknya. Selain nilai tersebut, Haryana juga tak lupa mengingatkan anak-anaknya agar selalu mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah ataupun tempat bekerja. Terakhir, ia juga mengingatkan untuk senantiasa bersyukur atas setiap nikmat dari Allah.

Meski memiliki ritme kerja yang padat, Haryana selalu mencoba memanfaatkan waktu yang sedikit untuk memberikan pelajaran kehidupan kepada anak-anaknya. Ia juga menggunakan waktu luang pada hari Minggu untuk *refreshing* bersama keluarga

dengan makan bersama di luar rumah. Anak-anak Haryana sangat menggemari hasil masakan Prasdiyati, sehingga jarang sekali mereka mau untuk diajak makan di luar rumah. Bagi Haryana, istrinya telah berperan besar sebagai istri dan ibu rumah tangga untuk menyiapkan segala sesuatu bagi dirinya dan keluarga. Oleh karena itu, tak jarang ia memberi kesempatan istrinya berlibur dari rutinitas di dapur.

#### Harapan

Haryana memiliki harapan yang tak muluk-muluk. Ia hanya berharap selalu diberi kesehatan hingga masa purnabaktinya tiba. Sementara itu, harapan bagi pekerjaan adalah agar reformasi yang berjalan saat ini tidak berhenti, bahkan perlu semakin diperluas. Terobosan-terobosan baru mutlak diperlukan dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul.

Haryana menganggap unit kerjanya selama ini memiliki tugas tambahan selain tugas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni sebagai pemersatu bangsa. Hal tersebut karena unit kerja di DJPB tersebar merata di seluruh nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Tugasnya pun tak ringan. Meskipun dalam situasi bencana sekalipun, kantor tidak boleh tutup. Hal ini akan berdampak pada tidak terbitnya pembayaran atas tagihan yang ada.

Sebagai contoh, saat terjadi kerucuhan di Ambon dahulu, pegawai KPPN tetap harus ada di sana karena tugas dari pegawai adalah memberikan jaminan bahwa gaji pegawai negeri akan selalu dibayar tepat waktu, serta setiap tagihan pembangunan yang valid dan akuntabel akan terbayarkan. Oleh sebab itu, pegawai KPPN perlu senantiasa bergandengan tangan dengan pemerintah di daerah untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi apapun.

Teks Abdul Aziz

# Mengawal Reorientasi Ekonomi Berbasis Investasi



Tahun 2017 adalah waktu yang krusial bagi perekonomian Indonesia. Selain memasuki fase baru perkembangan perekonomian global, tahun ini merupakan momentum yang sangat menentukan bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen di tahun 2018. Hal ini sebagaimana arahan yang disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet terakhir. Kuartal kedua 2017 secara khusus juga menjadi penanda hampir 2,5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang berarti banyak hal, termasuk keberlanjutan reformasi di bidang ekonomi.

Dari sisi global, perkembangan ekonomi negara-negara penopang seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok diharapkan memberikan dampak bersih yang positif terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Meskipun kebijakan proteksionisme pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan “a mixed feeling” bagi sebagian besar pelaku ekonomi, secara keseluruhan perkembangan ekonomi AS tetap diperkirakan memberikan dampak yang sedikit positif (*slightly positive*) terhadap dunia.

Hal ini disebabkan oleh dua aspek utama. *Pertama*, dari sisi perbaikan

penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan perkembangan terakhir, tingkat pengangguran (*unemployment rate*) AS sudah mencapai 4,7 persen atau sangat rendah secara historis. Apabila kebijakan proteksionisme terus diterapkan, maka akan timbul risiko inflasi yang bersumber dari upah (*wage inflation*), terutama di kalangan kelas pekerja (*working class*) atau *semi-skilled class* di AS. Dari sudut pandang ini, pembatasan impor AS dari negara-negara ASEAN bukan merupakan kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian AS.

*Kedua*, ekspektasi perbaikan ekonomi AS yang diperkirakan menyebabkan

meningkatnya harga komoditas global. Meskipun diperkirakan tidak sebesar di tahun 2016, kenaikan harga diperkirakan berdampak baik bagi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia yang didominasi oleh perdagangan komoditas. Selain itu, meningkatnya harga komoditas global juga baik bagi sektor perbankan sebagai salah satu sumber investasi karena kinerja sebagian besar perusahaan pengakses kredit (*borrower*) sangat terpengaruh harga komoditas global.

Perekonomian negara lain yang memiliki dampak terhadap kondisi global adalah Tiongkok. Perkembangan perekonomian Tiongkok pada 2017 juga diharapkan berpengaruh positif terhadap Indonesia, terutama berasal dari keberlanjutan stimulus fiskal pemerintah negeri Tirai Bambu di tahun 2016. Kebijakan stimulus fiskal pemerintah Tiongkok serta koreksi terhadap kelebihan kapasitas (*over supply*) di sana telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian global dengan meningkatkan harga komoditas global pada dua kuartal terakhir di tahun 2016. Kedua hal tersebut menjadi krusial karena *over supply* di Tiongkok selama ini menyebabkan terhentinya “*factoricate deflation*”, di mana terjadi deflasi *Producer Price Index* (PPI) selama tujuh tahun berturut-turut. Selain AS dan Tiongkok, pemilihan umum di Zona Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Jerman tahun ini akan menjadi momentum yang akan diantisipasi para pelaku ekonomi.

## Fokus pada keberlanjutan reformasi

Meskipun terdapat risiko global, untuk mencapai target pertumbuhan investasi, Indonesia perlu tetap fokus terhadap pendayagunaan potensi ekonomi domestik seperti bonus demografi serta reformasi di berbagai bidang ekonomi.

Meskipun terdapat risiko global, untuk mencapai target pertumbuhan investasi, Indonesia perlu tetap fokus terhadap pendayagunaan potensi ekonomi domestik seperti bonus demografi serta reformasi di berbagai bidang ekonomi.

Foto  
Anas Nur Huda

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga dalam kisaran lima persen dianggap sebagai prestasi yang baik dibandingkan dengan *emerging market economies* (EME) lainnya. Tren yang mulai positif di tahun 2016 menunjukkan sinyal kuat untuk berlanjut ke depan. Hal ini terkonfirmasi oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 dan 2018 dari berbagai lembaga, termasuk Dana Moneter Internasional.

Selain pertumbuhan ekonomi, stabilitas indikator makro ekonomi yang terjaga juga diakui oleh banyak pihak, terutama dari sisi fiskal, moneter, dan keuangan. Dari sisi fiskal, defisit APBN di tahun 2016 yang berada jauh di bawah *ceiling* tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) merupakan salah satu indikator bahwa kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*) Indonesia sangat dijaga.

Dari sisi moneter, inflasi terjaga di level yang sangat rendah. Di tahun 2016, inflasi bahkan berada di sekitar tiga persen, level yang termasuk sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter dan penurunan biaya dana investasi menuju *single digit*.

Dari sektor keuangan, rasio defisit neraca pembayaran terhadap PDB mengecil serta volatilitas nilai tukar rupiah semakin terkendali seiring meningkatnya kemampuan korporasi Indonesia memitigasi risiko nilai tukar (*strong dollar*) melalui kebijakan lindung nilai (*hedging*). Dari sisi kebijakan fiskal, reformasi di bidang kebijakan belanja pemerintah sangat diapresiasi oleh investor. Hal ini terutama berkaitan dengan kebijakan realokasi anggaran dari operasional (subsidi energi) sebesar hampir 80 persen ke investasi modal (infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan) yang sangat mendukung akselerasi pembangunan.

## Investasi sebagai *prime mover*

Dari keempat komponen perekonomian yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan internasional, yang paling potensial menjadi *prime mover* bagi perekonomian di tahun 2017 adalah investasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat konsumsi masyarakat yang sudah sangat kuat, pengeluaran pemerintah yang terbatas aturan fiskal, serta perkembangan perdagangan eksternal yang pemulihannya terpengaruh perekonomian global.

Untuk menopang target pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi perlu tumbuh 24 persen, atau mencapai hampir dua kali lipat dari kinerjanya di tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp612,8 triliun. Nilai investasi itu bahkan masih tidak termasuk investasi di sektor migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah tangga.

Dengan angka lebih dari 600 triliun rupiah itu, investasi tumbuh sebesar 12,4 persen (*year on year*). Jumlah ini melebihi yang ditargetkan di awal tahun 2016.

Kinerja investasi di tahun 2017 diharapkan disumbang oleh berbagai sumber yaitu pemerintah pusat, sektor perbankan melalui penyaluran kredit, pasar modal, investasi langsung baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, belanja modal BUMN, serta dana internal korporasi.

#### Keberlanjutan inovasi di bidang investasi

Dari sisi politik, tahun 2017 dan 2018 adalah waktu yang kritis bagi perekonomian Indonesia. Pada kedua tahun ini, iklim politik akan diwarnai banyak inovasi perubahan (*changes*). Sementara pada tahun-tahun berikutnya, ruang inovasi akan semakin kecil seiring arah kebijakan yang cenderung bersifat evaluatif. Salah satu inovasi perubahan yang diharapkan berlanjut dan semakin baik di dua tahun ini adalah reformasi investasi sebagai bentuk reorientasi ekonomi. Deregulasi, eksperimentasi kebijakan (*policy experimentation*) dalam rangka inovasi, dan implementasi menjadi kunci penting momentum reformasi ini.

Di luar soal inovasi, program amnesti pajak adalah salah satu kontributor bagi baiknya performa investasi baik di tahun 2016 maupun awal tahun 2017, khususnya investasi sektor perbankan. Pada periode kedua program amnesti pajak yang dimulai dari bulan Oktober 2016, likuiditas di sektor perbankan meningkat sangat pesat dari sebelumnya empat persen menjadi sepuluh persen (*year on year*).

Peningkatan likuiditas ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas investasi korporasi melalui penyaluran kredit. Namun demikian, proses ini berlangsung cukup lambat. Pada kuartal terakhir, terjadi peningkatan penyimpanan cadangan bank komersial di Bank Indonesia yang menunjukkan rendahnya kemampuan penyerapan kredit. Salah satu penyebab utamanya adalah permintaan kredit yang masih rendah. Ke depannya, dana repatriasi perlu diarahkan ke instrumen keuangan yang lebih produktif dan berjangka panjang, seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN-BUMN infrastruktur.

Selain meningkatkan likuiditas perekonomian, program amnesti pajak juga mendorong investasi dengan meningkatkan kepercayaan dan minat investor secara umum. Hal ini ditandai salah satunya dengan keberhasilan penerbitan sukuk global oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2017 yang mencapai empat kali lipat di atas jumlah yang direncanakan. Selain itu, arus modal asing dalam portofolio Indonesia juga meningkat pesat di kuartal I 2017.

#### ” Komentor Pakar



**Thomas Lembong,**  
Kepala Badan Koordinasi  
Pengawasan Modal

Dalam Indonesia Investment Forum 2017 di Jakarta, Selasa (4/4).

Terdapat paling tidak lima kendala (*obstacles*) investasi di Indonesia. *Pertama*, tingginya angka perubahan regulasi yang tidak dapat diantisipasi oleh investor. Hal ini menjadikan iklim yang kurang kondusif bagi investasi jangka menengah dan panjang.

*Kedua*, kurang terdiversifikasinya penerimaan pajak di Indonesia. Saat ini, sebagian besar penerimaan pajak berasal dari pajak badan (*corporate tax*). Sebesar 70 persen dari *corporate tax* berasal dari sektor manufaktur. Namun demikian, dapat kita lihat bahwa sektor manufaktur memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat kecil, yaitu sebesar dua hingga tiga per tahun apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat lima hingga enam persen (*year on year*). Artinya, terdapat indikasi bahwa sektor ini dipajaki terlalu tinggi (*over-taxed*).

*Ketiga*, isu terkait ketenagakerjaan. Saat ini, salah satu kendala investasi adalah kebijakan terkait tenaga kerja asing yang kurang fleksibel, terutama berkaitan dengan izin kerja (*work permit*). Aturannya pun sudah berusia 13 tahun, sehingga harus segera disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

*Keempat*, izin penggunaan lahan (*land permit*). Kita membutuhkan pemberian izin yang lebih cepat. Untuk beberapa pemerintah daerah, hal ini cukup sulit untuk diterapkan.

Terakhir terkait pembangunan infrastruktur. Khusus untuk investasi infrastruktur, salah satu kendala utama adalah terkait ketersediaan proyek infrastruktur yang *bankable*. Perlu desain ulang peran pemerintah dalam menyelesaikan hal ini melalui penyediaan penjaminan kredit (*credit enhancement*).

Kebijakan deregulasi untuk mendorong investasi sudah dilakukan melalui peluncuran 14 paket kebijakan. Paket kebijakan 15 dan 16 akan segera diluncurkan oleh BKPM di tahun 2017 ini untuk melengkapi inovasi di bidang kebijakan investasi. Selain paket kebijakan, merevisi peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan untuk mengakomodir lingkungan ekonomi yang fokus pada pengembangan tenaga kerja (*labor-intensive*).

Teks Adelia Pratiwi

Dapatkan informasi yang Anda butuhkan di  
[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)



**SIPRIDA**

Sistem  
Komunikasi  
Pajak dan  
Retribusi  
Daerah



**KOMANDAN**

Komunikasi  
dan  
Manajemen  
Data  
Nasional



**PANDITA**

Penyampaian  
Data Informasi  
Gaji dan  
Tabungan  
Asuransi PNSD



**SIKD**

Sistem  
Informasi  
Keuangan  
Daerah



**WBRS-DAK**

Web-Based  
Reporting  
System  
Dana Alokasi  
Khusus



**SIMTRADA**

Sistem  
Informasi  
Transfer  
ke Daerah  
dan Dana Desa

# APBN Kredibel yang Mendorong Pembangunan Infrastruktur

Teks Joko Tri Haryanto\*)

Pemerintah telah menyampaikan hasil penghitungan sementara pelaksanaan APBN-P 2016. Dalam siaran pers yang diterbitkan awal Januari, realisasi belanja negara disebutkan telah mencapai Rp1.859,5 triliun atau sekitar 89,3 persen dari target Rp2.082,9 triliun. Sementara realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.551,8 triliun atau 86,9 persen, sehingga defisit yang tercipta sebesar 2,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika dilihat dari pelebaran defisit yang sempat dilakukan, realisasi 2,46 persen ini relatif aman. Kondisi ini tak lepas dari beberapa kebijakan yang sudah diambil, misalnya pengetatan dan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) termasuk penundaan anggaran ke daerah, meskipun akhirnya pada paruh terakhir 2016, anggaran yang ditunda sudah direalisasikan seluruhnya.

Beberapa saat sebelumnya, pemerintah telah mempublikasikan postur APBN 2017. Dengan mengambil strategi utama memacu pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang dilakukan adalah mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjaga APBN yang kredibel serta realistis, pengalokasian insentif bagi sektor strategis, dan dukungan untuk menjaga konsumsi yang berketahanan. Kebijakan jangka pendek menengah

yang dilakukan antara lain kebijakan subsidi yang lebih baik serta belanja untuk kesejahteraan sosial. Dari sisi insentif, pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi sekaligus menjaga iklim investasi. Sementara dalam jangka panjang diupayakan terjadinya penghitungan target penerimaan yang realistis demi meningkatkan belanja produktif, termasuk infrastruktur serta regulasi mendorong perdagangan domestik yang bernilai tambah tinggi.

## Upaya perbaikan

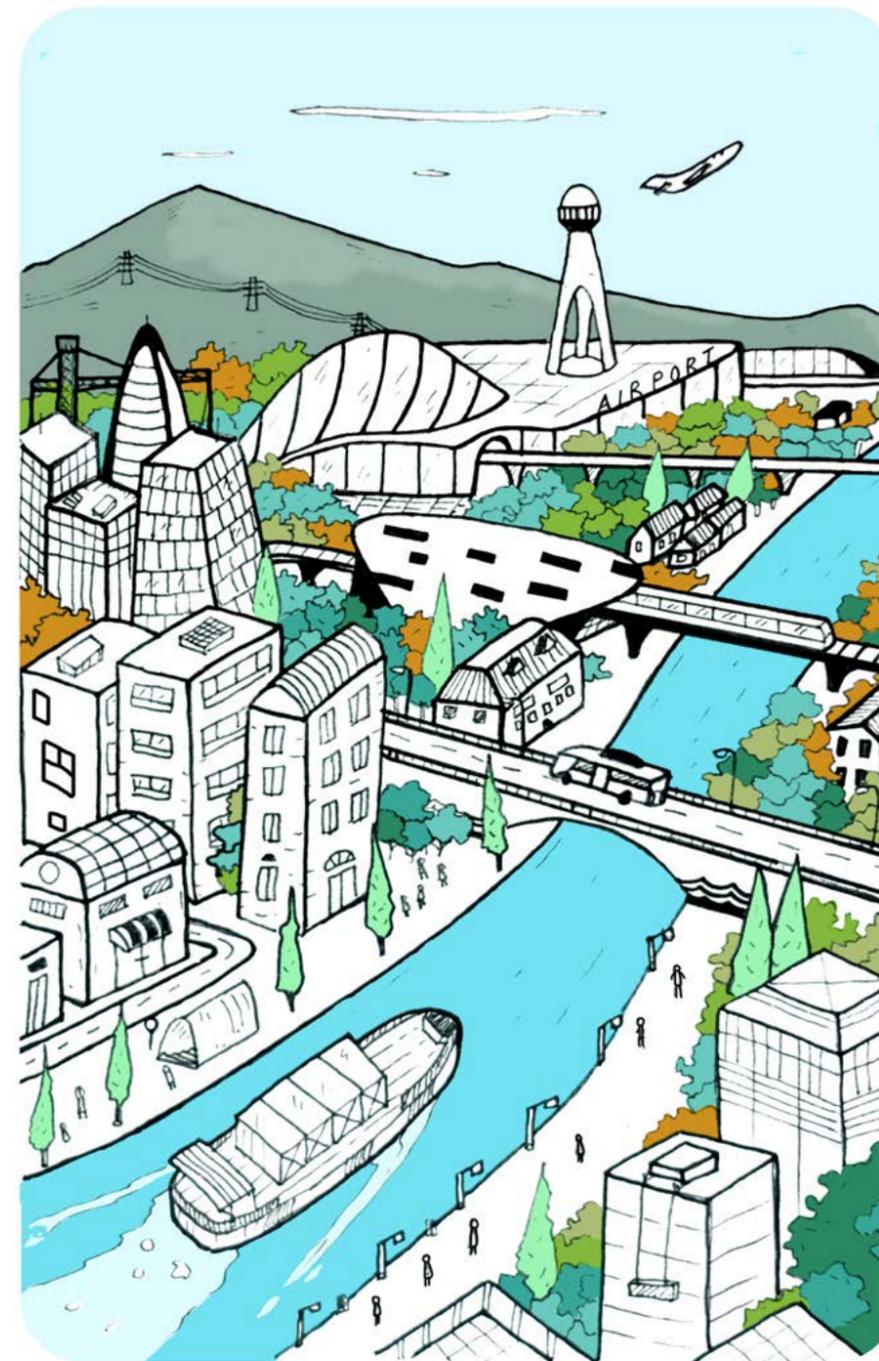
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, sejak Januari 2017 pemerintah mulai menjalankan beberapa reformasi kebijakan. Diawali dengan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA, sehingga yang berhak menerima subsidi ke depan hanya masyarakat pelanggan 450 VA per bulan. Hal ini didasarkan pada beberapa hasil temuan lapangan yang menunjukkan indikasi kelompok pengguna 900 VA ternyata tidak lagi memenuhi kriteria layak menerima subsidi listrik.

Meskipun awalnya bertahap, atau hanya 18 juta dari 23 juta pelanggan kelompok 900 VA yang akan dicabut subsidi, pemerintah mengharapkan pada Mei 2017 seluruh pelanggan 900 VA tidak akan menerima subsidi lagi. Rencana pencabutan subsidi listrik kelompok 900

VA ini sebetulnya sudah digagas sejak Januari 2016 lalu. Namun sayangnya, pemerintah belum sepakat dengan DPR terkait hal ini. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan ditunda dan mengakibatkan negara menanggung biaya hingga Rp12,4 triliun. Kenaikan ini juga dipicu keputusan menunda kenaikan tarif listrik.

Per 14 Januari 2017, pemerintah juga akan meluncurkan program bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) atau yang sekarang bernama beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) non-tunai. Penyaluran bantuan Raskin non-tunai tersebut rencananya akan menysasar sekitar 1,4 juta keluarga kurang mampu. Sama dengan subsidi listrik, masalah ketidaktepatan sasaran penerima juga mendasari keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan menjadi non-tunai. Ditengarai masih banyak penduduk kategori mampu yang justru menikmati alokasi Rastra tersebut, selain persoalan ketidaktepatan lainnya (frekuensi dan jumlah).

Hampir bersamaan dengan rencana penyaluran Rastra non-tunai, pemerintah juga menyiapkan kebijakan subsidi gas 3 kg secara elektronik. Dengan demikian, ke depan masyarakat akan menerima bantuan sosial pemerintah secara paket non-tunai (Rastra, subsidi listrik, dan gas 3 kg) dalam sistem dompet elektronik (*e-wallet*). Harapannya program



Ilustrasi  
Muhammad  
Andika Amin

pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah akan semakin efisien dan efektif.

Hal ini dapat ditelusuri dari kinerja pengentasan kemiskinan pada 2016. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 23 provinsi berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Lampung. Sementara 11 provinsi lainnya justru mengalami kenaikan, di antaranya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Maluku.

Apresiasi tentu juga wajib diberikan kepada inisiatif para kepala daerah yang mampu menurunkan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Secara keseluruhan, total penduduk miskin di Indonesia per September 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,7 persen dari total populasi. Jumlah tersebut turun 0,86 persen dari 28,01 juta orang atau 10,86 persen dari posisi pada Maret 2016. Sayangnya, kinerja ini belum mampu memenuhi target penurunan angka kemiskinan dalam APBN 2016 sebesar 10-10,6 persen. Pada 2017, pemerintah menargetkan angka kemiskinan sekitar 9,5-10,5 persen.

Memasuki tahun 2017, pemerintah masih akan terus melanjutkan berbagai percepatan program-program pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai tahun-tahun sebelumnya. Di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tahun ini sedianya akan dibangun jalan sepanjang 815 km, jembatan sepanjang 9.399 km, pembangunan sekaligus penyelesaian 13 bandara, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi, jalur kereta api tahap I dan lanjutannya, serta modernisasi terminal penumpang di tiga lokasi lanjutan.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp377,8 triliun atau hampir setara dengan 18,6 persen dari total belanja negara. Dibandingkan waktu yang sama dalam lima tahun terakhir, alokasi tersebut meningkat sangat signifikan. Di tahun 2012 misalnya, alokasi belanja infrastruktur masih 9,8 persen total belanja negara, untuk kemudian naik 14,2 persen di tahun 2015 dan 15,2 persen di tahun 2016. Menariknya, kenaikan persentase alokasi di tahun 2017

juga didukung dengan adanya kewajiban pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang awalnya mayoritas habis hanya untuk belanja gaji dan operasional semata. Ini artinya semangat pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja daerah mulai terealisasi.

#### Peraturan baru

Keseriusan memperbaiki berbagai masalah pendanaan infrastruktur sejujurnya sudah dimulai sejak tahun lalu melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Secara tegas kedua aturan tersebut menginstruksikan kepada para penyelenggara negara untuk menghilangkan berbagai masalah dan hambatan demi percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Yang dimaksud sebagai para penyelenggara negara adalah para menteri, jaksa agung, kapolri, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, pemimpin lembaga non-kementerian, serta gubernur dan kepala daerah.

Jenis masalah dan hambatan yang seyogyanya dihilangkan di antaranya penyiapan pengadaan lahan proyek, pendanaan proyek, perizinan dan non-perizinan, pelaksanaan pembangunan fisik, pengawasan, pertimbangan hukum, sekaligus mitigasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Beleid juga menyebutkan amanat bagi menteri dalam negeri untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan proyek serta memberikan sanksi jika dibutuhkan.

Sementara kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa diwajibkan untuk melakukan pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa demi proyek strategis nasional. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan berfungsi meningkatkan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan melakukan audit investigasi atas kasus-kasus penyalahgunaan wewenang.

Jaksa agung diimbau untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum menyidik laporan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang dalam proyek strategis nasional serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan laporan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang proyek strategis nasional. Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mengkoordinasikan jaksa agung, kapolri, serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk menyusun ketentuan SOP pemanggilan dan pemeriksaan pejabat atau pegawai pemerintah, pejabat BUMN, atau badan usaha oleh kejaksaan dan kepolisian.

#### Wajib koordinasi

Aturan tersebut ditanggapi positif oleh beberapa pihak, mengingat koordinasi memang menjadi persoalan utama di tubuh pemerintah selama ini. Visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam beberapa kesempatan justru mendapat tantangan akibat kurangnya koordinasi diinternal pemerintah. Seringkali publik dibikin terheran-heran dengan beragamnya *statement* yang muncul.

Secara umum, nilai besaran investasi proyek prioritas di tahun 2016 mencapai Rp912,7 triliun. Beberapa proyek strategis

di antaranya program pembangkitan listrik 35.000 MW; pembangunan kilang minyak Pertamina di Cilacap, Balikpapan, dan Tuban; kereta cepat Jakarta-Bandung; LRT Jakarta-Bogor-Bekasi; Pelabuhan Kuala Tanjung; Jalan Tol Pekanbaru-Dumai; Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono; serta Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

Percepatan pembangunan tersebut memang dirancang dalam upaya mewujudkan tema utama APBN 2016 "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas". Adapun strategi yang ditempuh di antaranya: memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global dan mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Untuk itulah, dibutuhkan pola pemikiran *out of the box* demi menjaga kesinambungan alokasi anggaran infrastruktur yang memadai. Jika seluruh mekanisme tersebut dapat dijalankan, ke depannya penulis yakin bangsa Indonesia akan mampu mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi yang hilang satu persen menurut versi Bank Dunia, sekaligus mencapai status negara dengan skala ekonomi terbesar ke-7 di dunia sebagaimana yang sudah disampaikan dalam visi misi "Bersama Indonesia Maju 2030".

*\*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

*\*) Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*

# PERKAYA PENGETAHUANMU TENTANG KEUANGAN NEGARA



## BACA MAJALAH EDUKASI KEUANGAN

MELALUI:

[www.bppk.kemenkeu.go.id/layanan/majalah-edukasi](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/layanan/majalah-edukasi)



HALO BPPK 021-29054300

# Perjalanan Jauh yang Ditempuh Janu

Sebagai anak penjual sayur di kabupaten kecil Sleman, Yogyakarta, Janu Muhammad membuktikan bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah dari mana seseorang berasal, tapi ke mana dia mau pergi. Janu panggilan akrab pemuda itu—melanglang buana dari Amerika Serikat hingga India untuk mereguk ilmu dalam dimensi yang beragam. Kini, dia menjelajah berbagai kota dan negara-negara di dunia dari Britania Raya sembari menyelesaikan studi S2 di sana.

Pada September 2016, Janu memulai program pendidikan MSc *Research in Human Geography* di *University of Birmingham*, Inggris dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ke manapun dia pergi, nasihat ibu dipeluknya erat-erat. “Nak, belajarlal yang rajin, milikilah kejujuran, jadilah anak sholeh dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata laki-laki kelahiran 7 Januari 1993 tersebut mengingat petuah ibunya.

Janu bersyukur dilahirkan dari keluarga sederhana. Meskipun sang ibu hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan ayahnya bahkan berhenti sekolah di kelas tiga SD, mereka selalu bekerja keras demi pendidikan anak-anak. “Kedua orang tua saya tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi, tapi mereka adalah profesor terbaik yang pernah saya miliki,” ujar anak sulung dari dua bersaudara itu.

Pada upacara wisuda Universitas

Negeri Yogyakarta (UNY) bulan Agustus 2015, Janu dinobatkan menjadi lulusan terbaik di Jurusan Pendidikan Geografi. Dia juga menyandang gelar aktivis terbaik di Fakultas Ilmu Sosial. Pada tahun yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Sleman memberikan penghargaan sebagai Pemuda Pelopor di bidang pendidikan. Janu mempersembahkan prestasi-prestasi gemilang itu untuk kedua orang tua yang telah mengantarkannya meraih gelar sarjana.

## Perjuangan keras

“Setelah lulus dari UNY, saya harus merawat Mamak yang baru menyelesaikan operasi sembari mengikuti kursus TOEFL karena skor saya masih rendah,” kata Janu memulai kisahnya memperjuangkan beasiswa S2 dari LPDP. Seringkali dia juga harus pergi ke pasar Sleman untuk membantu orang tuanya berjualan sayuran.

Pada pertengahan Oktober 2015, Janu mendaftar program seleksi beasiswa LPDP jalur afirmasi prestasi dari keluarga kurang mampu. Dia dipandu oleh kakak senior sesama alumni UNY yang saat itu tengah menempuh studi di *University of Birmingham* dalam proses penulisan esai. Setelah melalui rangkaian seleksi, pada Desember 2015, Janu dinyatakan lulus. Yang istimewa, pengumuman kelulusan LPDP kala itu hampir bersamaan dengan pengumuman beasiswa YSEALI *Academic Fellowship* ke *Arizona State University*,



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2  
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710  
Telp/Faks. (021) 3846474  
E-mail. lppd@depkeu.go.id  
Twitter/Instagram. @LPDP\_RI  
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI  
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Amerika Serikat.

Dinyatakan lulus seleksi LPDP baru menjadi langkah awal bagi Janu. Pada saat itu, skor ujian bahasa Inggris Janu belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan surat dinyatakan diterima tanpa syarat dari kampus yang ingin dituju. Dia pun mesti mengikuti program pengayaan bahasa di kampus Institut Teknologi Bandung selama tiga bulan. Janu hampir menyerah dan ingin menunda kuliah. Lima kali tes bahasa Inggris, belum cukup juga nilainya. Belasan juta rupiah telah habis-habisan dikeluarkan dari kantongnya. “Saya sempat bekerja dan menabung untuk membayar biaya tes itu,” kata Janu. Upaya kerasnya berhasil di titik akhir. Dia dinyatakan diterima di *University of Birmingham*.

## Geografi manusia

Di Birmingham, Janu belajar bidang ilmu Geografi Manusia atau *Human Geography*. Bidang ilmu itu adalah cabang dari disiplin ilmu geografi yang mempelajari aspek-aspek keruangan beserta gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi dengan manusia sebagai objek pokoknya. “Saya mempelajari sisi sosial dari ilmu geografi yang di antaranya mencakup geografi ekonomi, kota, pembangunan, politik, dan budaya,” ujar Janu.

Fokus studi Janu adalah pada kajian geografi kota (*urban geography*) dengan minat bidang riset pada fenomena gentrifikasi dan regenerasi kota. Janu

memiliki alasan yang kuat untuk menekuni kajian geografi kota. “Menurut saya, kontribusi ilmuwan geografi (geograf) kota di Indonesia masih minim, terutama pada bidang strategis perencanaan kota berkelanjutan,” kata dia. Padahal, dengan mempelajari bidang tersebut, geograf kota dapat melakukan riset dan memberikan pengaruh pada perumusan kebijakan tata kota dalam perspektif geografi.

Menurut Janu, Indonesia masih kekurangan ilmuwan geografi, sedangkan jumlah permintaan tenaga profesional di bidang ini sebetulnya sangat tinggi. Utamanya pada beberapa sektor strategis seperti pembangunan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, tata kota, dan geospasial. Di Indonesia saat ini, hanya ada dua Fakultas Geografi dari dua kampus dan 31 perguruan tinggi dengan jurusan geografi.

Sebagai bagian dari program studi S2-nya, Janu tengah melakukan persiapan penelitian di Rotterdam, Belanda. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis dampak-dampak serta strategi yang perlu dilakukan dengan adanya fenomena gentrifikasi dan *urban redevelopment* di Kop van Zuid. “Dari penelitian ini, saya berharap ada pelajaran yang bisa diambil untuk kota-kota di Indonesia, terutama di daerah yang kini sedang melakukan pembangunan secara masif seperti di Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta,” kata Janu. Harapannya, pembangunan di kota-kota tersebut bukan hanya untuk mencapai aspek kesejahteraan ekonomi, melainkan juga memperhatikan aspek kelingkungan dan sosial masyarakat.

## Aktivitas lain

Selain fokus di bidang akademik, Janu masih menyempatkan diri untuk aktif di kegiatan organisasi. Pada Oktober 2016, dia terpilih sebagai ketua Perhimpunan Pelajar dan Masyarakat Indonesia Birmingham (PPI-MIB). Anggota PPI-MIB tak kurang



Janu melanglang buana menempuh perjalanan jauh demi mewujudkan impiannya.

Foto Paksi Manggala P.

dari 300 orang. Selain itu, dia juga menjadi pengurus Pengajian Birmingham, salah satu perwakilan *Postgraduate Representative* di *College of Life and Environmental Sciences*, serta tergabung sebagai peneliti muda Indonesia di *Urban Commission of International Geographical Union (IGU)*, *Royal Geographical Society*, dan *Regional Studies Association*.

Untuk menyeimbangkan diri agar tidak stres kuliah, Janu meluangkan waktu untuk *traveling* dan mengisi seminar *online* seputar beasiswa LPDP ataupun pengalaman kuliah di Inggris. “Terakhir, saya juga selalu mencoba menjaga kesehatan dengan rutin olahraga dan memenuhi kebutuhan gizi dengan baik,” ujar Janu.

## Rencana ke depan

Janu mantap menatap dirinya di masa depan sebagai seorang dosen geografi manusia serta peneliti. “Saya juga berharap agar hasil penelitian yang saya lakukan dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan kota di tempat kelahiran saya, Sleman atau kota lainnya,” kata dia.

Untuk mencapai mimpinya menjadi dosen dan peneliti, Janu berencana mengejar kesempatan studi doktoral selepas S2 nanti. “Kini, saya sedang mempersiapkan segala syarat-syaratnya,” ungkapnya. Peraih berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional itu merasa LPDP menjadi jembatan emas untuk menjemput mimpi-mimpi anak muda seperti dirinya. “Berkat dukungan LPDP, di tengah padat-padatnya studi di Birmingham, saya berkesempatan mengikuti konferensi geografi internasional di India,” kata Janu melanjutkan. Pada konferensi itu, Janu bertemu dan berdiskusi langsung dengan presiden geograf dunia serta bidang geografi kota untuk beberapa proyek di masa depan.

Janu berharap akan semakin banyak lagi generasi muda yang dapat melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP. Selepas studi nanti, dia berharap para generasi yang menjadi tulang punggung bangsa di masa depan dapat kembali ke tanah air dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia sesuai bidang masing-masing.

Teks Dwinanda Ardhi

# MOFIN: Kebutuhan atau Ritual?

Teks Bayu Nurcahyono, Pegawai Sekretariat Jenderal

Penilaian kesehatan organisasi Kementerian Keuangan yang lebih kita kenal dengan *Ministry Of Finance Organizational Fitness Index* (MOFIN) telah dua kali dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015. Dua tahun berlalu, MOFIN kembali hadir di Triwulan II tahun 2017 sebagai perwujudan KMK Nomor 523 Tahun 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan penilaian kesehatan organisasi Kementerian Keuangan paling sedikit setiap dua tahun.

MOFIN diperlukan untuk menjaga kinerja tinggi organisasi secara berkesinambungan. Organisasi diharapkan mampu menyelaraskan faktor-faktor internal, mengeksekusi strategi, dan melakukan pembaruan untuk menghasilkan *output* yang sejalan dengan indikator kinerja.

Penilaian dikelompokkan ke dalam 3 klaster, 9 dimensi, dan 37 indikator. Menjadi pertanyaan, apakah pelaksanaan MOFIN dengan puluhan pernyataan dalam kuesionernya mampu menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan organisasi atau berhenti pada sebuah pengukuran.

Organisasi selevel kementerian mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar. Kesejahteraan negara bertumpu pada organisasi yang mengelola negara dan orang-orang di dalamnya. Melalui *output* yang dihasilkan, organisasi

mampu berkontribusi pada bergulirnya roda perekonomian dan memicu terciptanya efek berganda.

Tanggung jawab tersebut melekat pula pada Kementerian Keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif. Kementerian Keuangan dituntut untuk mampu menjadi patokan bagi Kementerian/Lembaga lain, baik dalam kinerjanya mengelola perekonomian maupun dalam pengelolaan organisasi.

Organisasi merupakan sebuah benda tanpa jiwa yang tak akan mampu bergerak apalagi berperan nyata dalam tanpa keterlibatan manusia. Peran penting manusia di dalamnya adalah untuk menetapkan tujuan bersama dan menghidupkan organisasi agar berhasil mencapai tujuan tersebut.

Nilai yang menjadi acuan bersama menjadi kekuatan organisasi untuk tumbuh dan menjadi pembeda dari organisasi yang lain. Nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku kerja akan tumbuh menjadi budaya yang mendorong kejujuran, transparansi dan keterbukaan.

Keterlibatan dan kejelasan peran masing-masing pegawai dalam mencapai tujuan organisasi merupakan hal penting untuk membangun rasa memiliki. Dengan begitu, pegawai berkontribusi dengan jiwa, bukan sekedar menyelesaikan tugas tanpa makna.

Membangun rasa memiliki pegawai

dapat dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karir sesuai potensi yang dimiliki. Sungguh ironis, bila pegawai dituntut memberi kinerja terbaik dengan berbagai ancaman hukuman disiplin namun minim apresiasi. Apresiasi tidak melulu terkait insentif keuangan, namun juga pengakuan yang memotivasi pegawai. Penempatan pegawai harus tepat sesuai kompetensinya. Selain itu, kapasitas pegawai harus dikembangkan untuk menghadapi tantangan yang semakin meningkat.

Pemimpin memberi pengaruh besar atas kesuksesan pencapaian tujuan. Pemimpin yang baik mampu memotivasi dan menginspirasi pegawai dalam melaksanakan tugas. Seorang pemimpin diharapkan menggunakan metode kepemimpinan yang tepat sesuai kondisi. Kepemimpinan otoritatif bisa saja diperlukan untuk memastikan terselesaikannya pekerjaan. Di sisi lain, bila diperlukan pemberdayaan pegawai melalui konsultasi atau pendelegasian tugas, maka pemimpin dapat menggunakan kepemimpinan konsultatif.

Budaya kerja dan kepemimpinan yang kondusif akan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemampuan adaptasi dapat ditingkatkan dengan mendukung tumbuhnya inovasi, mendorong iklim berbagi pengetahuan, dan kemampuan



Ilustrasi  
Muhammad  
Fithrah

menangkap ide-ide dari luar. Penting untuk membuka wawasan dan mengambil praktek-praktek terbaik dari luar agar organisasi dapat terus berkembang. Perlu pula membangun jejaring kemitraan kerja dengan institusi lain maupun dengan masyarakat.

## Tindak Lanjut MOFIN Sebelumnya

Analisis terhadap data MOFIN dapat mengukur kesehatan organisasi dari tingkat Kementerian Keuangan sampai dengan unit eselon II. Skor MOFIN untuk masing-masing tingkat merepresentasikan nilai kesehatan organisasi secara keseluruhan.

Masukan pegawai pada pertanyaan terbuka MOFIN dibahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perwakilan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dari masing-masing unit eselon I. Tujuannya adalah untuk

memperoleh informasi yang belum tertangkap pada kuesioner.

FGD yang dilakukan tahun 2015 tersebut menghasilkan beberapa hal yang menjadi perhatian pegawai. Contohnya, sarana untuk memberi ide-ide baru dan penghargaan bagi pegawai yang memberi ide inovasi telah tersedia. Namun, sarana tersebut belum dikomunikasikan dengan baik kepada para pegawai. Hasil analisis terhadap data MOFIN, masukan pegawai, dan hasil FGD menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut peningkatan kesehatan organisasi tahun 2016.

## Pentingnya Kesehatan

Sama halnya dengan kesehatan manusia, aspek-aspek kesehatan organisasi juga perlu dijaga. MOFIN merupakan langkah diagnosa terhadap kesehatan organisasi seperti hal

pemeriksaan kesehatan manusia oleh dokter. Hasil diagnosa harus akurat agar dapat menggambarkan kesehatan organisasi yang sebenarnya. Sebab itu, sangat penting bagi pegawai untuk memberi informasi sesuai kondisi riil yang dialami. Hasil diagnosa akan berpengaruh terhadap ketepatan rekomendasi tindak lanjut peningkatan kesehatan organisasi.

Kementerian Keuangan merupakan tempat bagi pegawai untuk menghabiskan separuh hidup. Berinteraksi dan beraktualisasi sesuai minat, kompetensi dan potensinya. Kementerian Keuangan yang sehat merupakan kepentingan bersama. Pada akhirnya, budaya organisasi yang terbangun akan berpengaruh pada kehidupan pegawai itu sendiri. Sekarang, masihkah kita abai akan kesehatan organisasi?



Ilustrasi  
Arfindo Briyan

# Transformasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Riviu PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia, pemerintah mengalokasikan anggaran ke daerah yang meningkat setiap tahun. Bahkan, dalam dua tahun terakhir anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melebihi anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

Dalam APBN 2017, anggaran TKDD dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun, sementara anggaran belanja K/L sebesar Rp763,6 triliun. Nilai tersebut menguatkan komitmen pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah karena dana yang ditransfer difokuskan untuk peningkatan kualitas belanja infrastruktur

dan perwujudan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Seiring meningkatnya anggaran TKDD, pemerintah melakukan transformasi kebijakan pengelolaan TKDD. Tujuannya adalah agar *governance* tetap terjaga dan dana yang ada dialokasikan sesuai tujuan. Dalam mengawal TKDD, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan TKDD pada 4 April 2017. Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya yang ditetapkan dalam PMK Nomor 48/PMK

## Pencairan DAU Dinamis

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 mengubah paling tidak enam kebijakan strategis dalam pengelolaan TKDD. Pertama, pencairan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, sehingga besaran DAU perdaerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamika perkembangan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Apabila penerimaan negara naik maka pagu DAU naik, demikian pula sebaliknya.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas APBN karena target penerimaan negara berupa ekspektasi sementara sifat belanja adalah komitmen. Dengan perubahan aturan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib membuat perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD-P) jika terdapat perubahan alokasi dan penyaluran TKDD. Ke depan, Pemda perlu menata kembali jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah, mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, memperkuat sumber pembiayaan lain, serta bekerja sama dengan badan usaha.

Perubahan kedua, adalah penyaluran TKDD didasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian *output* atas penggunaan dana yang telah disalurkan pada periode sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana

Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa.

Selain itu, terdapat perubahan besaran persentase penyaluran. Dalam aturan sebelumnya, DAK Fisik disalurkan sebanyak 30 persen pada kuartal I, 25 persen pada kuartal II, 25 persen di kuartal III dan 20 persen pada kuartal IV. Dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017, penyaluran pada kuartal I sebesar 30 persen, kuartal II 25 persen, kuartal III 25 persen, dan kuartal IV sebesar selisih antara dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan.

Ketiga, perubahan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Jika sebelumnya penyaluran dilakukan secara terpusat, maka dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 diatur bahwa penyaluran TKDD dilakukan melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemda akan memproses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ke KPPN setempat. Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan, meningkatkan koordinasi antara Pemda dengan Kementerian Keuangan, dan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Keempat, adanya penguatan peran gubernur dalam usulan kegiatan DAK Fisik dari kabupaten/kota. Gubernur juga berperan penting dalam sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK Fisik antardaerah, antarbidang, serta antara DAK Fisik dengan pendanaan lainnya.

Kelima, penyempurnaan kriteria DID. Selama ini kriteria DID adalah mendapat sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian dalam opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Peraturan Daerah untuk APBD yang ditetapkan secara tepat waktu. Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017, kriteria pengalokasian DID adalah pengelolaan keuangan

daerah (*e-budgeting, e-planning, dan e-procurement*), pelayanan dasar publik (misalnya menanggulangi gizi buruk), dan ekonomi kesejahteraan (seperti pengentasan kemiskinan).

Keenam, peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan layanan dasar publik dengan meningkatkan persentase tertentu dari dana transfer ke daerah yang bersifat umum. Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

## Penutup

Transformasi mekanisme penyaluran TKDD dilakukan agar pemanfaatan dana tersebut dapat mendorong pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara lebih efektif. Transformasi pengelolaan ini penting karena anggaran TKDD meningkat dari tahun ke tahun.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat dinamis merupakan bentuk nyata menjaga kredibilitas APBN. Bagi daerah, perubahan aturan ini harus bisa mendorong daerah untuk menyusun APBD secara realistis dengan skala prioritas.

Pemerataan pembangunan melalui TKDD harus disinergikan paling tidak antar tiga Kementerian yaitu Kementerian Keuangan sebagai penyalur TKDD, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina aparatur daerah, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengatur teknis perencanaan Dana Desa. Selain itu, peran gubernur dan kontribusi aktif dari pemerintah daerah mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang kuat, cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran akan dapat diwujudkan.

Teks Budi Sulistyono

# Pijar Anak Siantar di Negeri Paman Sam

Usianya saat itu masih 23 tahun, ijazah Diploma III pun masih belum di tangan, namun kiprahnya sebagai ketua organisasi diharuskan membawahi tim yang terdiri dari lulusan S1 dan S2 luar negeri.

Gulo kecil berlari keluar rumah dengan terengah, lalu memandang langit. Cahaya matanya berbinar melihat guratan awan putih yang menandakan sebuah pesawat baru saja melintas. Semangat bocah itu bergejolak. Ia bermimpi bisa melihat dunia yang lebih luas. Impiannya yang tinggi mungkin melebihi anak lain seumurannya.

Jaya Setiawan Gulo, akrab disapa Gulo, lahir dan tumbuh besar di desa Pematang Asilum, sebuah daerah berjarak 17 kilometer dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Gaya bicarannya yang tegas namun tetap luwes dan supel menyiratkan semangatnya yang tinggi. Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kualanamu, Sumatera Utara ini bisa dikatakan telah mewujudkan sebagian impiannya secara bertahap. Sebagai pegawai Bea dan Cukai yang belum genap lima tahun bekerja, Gulo telah mencicipi banyak pengalaman berorganisasi di dalam dan luar negeri.

Pada tahun 2012, ia sukses menjalani seleksi untuk mengikuti pelatihan *Customs Administrative Technique Program* di Seoul, Korea Selatan selama tiga minggu. “Saat itu saya pertama kalinya pergi ke luar negeri. Kami melakukan *study tour* di bandara Incheon dan pelabuhan Busan, kemudian dijamu oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Korea Selatan,” kenang pria kelahiran 8 Mei 1990 ini. Pengalaman itu membuatnya semakin bersemangat untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui berbagai komunitas internasional.

## Berbicara di Sidang PBB

Sejak SMA, Gulo sangat tertarik dengan bidang diplomasi. Mantan ketua *Indonesia Netherland Youth Society (INYS)* ini pernah bercita-cita untuk kuliah jurusan Hubungan Internasional. Keinginan ini masih terpendam hingga akhirnya pada 2013 ia dengan bersemangat mengikuti *Indonesia Model United*



Satu-satunya perwakilan Indonesia sebagai Duta Muda United Nations Environment Programme (UNEP) Asia Pasifik.

Foto Dok. Pribadi

*Nations (MUN)* di Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk melatih jiwa negosiasi, kemampuan diplomasi, dan keterampilan membuat *resolution paper*. Gulo bermimpi mengikuti *Model United Nations* di luar negeri. Dengan upaya keras menggalang dana, akhirnya Gulo berkesempatan mengikuti *London International MUN* pada tahun 2014.

Bukan Gulo namanya jika berhenti belajar. Keinginannya untuk mempelajari hal baru terus menuntut dirinya untuk berbuat lebih. Pada tahun 2015, Gulo mengikuti seleksi program beasiswa satu tahun dari *American Indonesian Exchange Foundation (Aminef)*. Berdekatan dengan kelulusannya sebagai mahasiswa DIII PKN STAN, Gulo pun dinyatakan lolos program beasiswa ke Amerika Serikat tersebut. Setelah mengalami proses perizinan panjang, akhirnya ia memutuskan mengambil cuti di luar tanggungan negara selama satu tahun.

Selama di Amerika Serikat, Gulo menjalani kuliah di *Edmonds Community College* jurusan *project management*. Walaupun tidak banyak anak Indonesia yang belajar di kampus Edmonds, Gulo bertekad untuk mengharumkan nama Indonesia. “Meskipun saya lulusan DIII, saya ingin membuat prestasi yang melebihi para lulusan S2 dan S3 di Amerika Serikat,” ujar Gulo yang sebelumnya berkuliah di program DI PKN STAN Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2008-2009. Selain itu, Gulo juga menginisiasi

terbentuknya *Edmonds Model United Nations* yang membuatnya berkesempatan untuk mengikuti *Harvard National Model United Nations* di Boston, Massachusetts.

Salah satu mimpi besar Gulo berhasil terpenuhi pada tahun 2016. Ia menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam forum bergengsi kepemudaan internasional bernama *United Nations Youth Assembly* di Markas Besar PBB, Amerika Serikat. “Saya ingin menjadi anak muda yang suaranya didengar di PBB,” ujar pria yang tulisannya pernah dipublikasikan di *Bill and Melinda Gates Foundation blog* ini.

Kiprah Gulo dalam *Model United Nations* sebenarnya terinspirasi oleh sosok yang menjadi *role model*-nya selama ini, Almarhum H. Adam Malik Batubara. Ya, Wakil Presiden Indonesia Ke-3 ini memang lahir dan besar di Pematang Siantar. Selain sebagai Wakil Presiden pada tahun 1978-1983, beliau merupakan orang Indonesia pertama yang didaulat memimpin Sidang Tahunan PBB sebagai Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1966. “Sebagai orang Pematang Siantar, saya sangat bersyukur bisa berbicara di sidang PBB seperti Pak Adam Malik. Bedanya, saya melakukannya di usia muda,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai *Director of Communication Indonesia Mengglobal* ini sembari tersenyum.

Gulo berharap bisa memberikan kontribusi lebih terutama dengan berkolaborasi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan. Kontribusi ini

diharapkan mampu meningkatkan integritas pegawai dan khususnya perbaikan serta percepatan *dwelling time* dengan tetap melakukan pengawasan yang inklusif.

## Aktif Sebagai Volunteer

Kini, Gulo aktif sebagai penggagas sebuah organisasi *non-profit* yang fokus di bidang pendidikan dan kerelawanan (*volunteerism*) bernama *The School Projects*. Keinginannya hanya satu, yaitu menghimpun para relawan muda Indonesia untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada anak-anak di pedalaman. Konsep ini sudah ia persiapkan matang-matang saat masih berada di Amerika Serikat. Setelah pulang ke Indonesia dan bertugas kembali di KPPBC Kualanamu, Gulo perlahan namun pasti mulai membentuk tim dan menyusun strategi pendanaan serta promosi. Salah satu sumber pendanaan di Indonesia yaitu melalui situs galang dana [www.kitabisa.com/wujudkanmimpimereka](http://www.kitabisa.com/wujudkanmimpimereka).

Kegiatan pertama Gulo beserta tim *The School Projects* akan berjalan pada bulan Juli 2017 di Desa Sikara-Kara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. “Saya tidak menyangka di Sumatera Utara masih banyak sekolah yang sangat memprihatinkan. Sekolahnya tidak jauh beda seperti di *film* *Laskar Pelangi*,” ujar lulusan SMAN 1 Matauli di Tapanuli Tengah ini. Pendidikan Tidak Bisa Menunggu, itulah nama proyek yang akan diselenggarakan di empat Sekolah Dasar di desa tersebut yang meliputi sekitar 1.021 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan 1 tas beserta perlengkapan sekolah seperti buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan penggaris. Semoga *The School Projects* bisa menginspirasi generasi muda Indonesia yang akan menumbuhkan Gulo-Gulo lainnya.

Teks Pradany Hayyu



Mengenalkan Indonesia kepada siswa SD di Amerika Serikat

Foto Dok. Pribadi

# Lebih Baik untuk Saling Memahami



**D**i dalam sebuah hubungan antar teman, antara atasan dengan bawahan, dan bahkan antara orang tua dengan anak, akan selalu diawali dengan proses saling mengenal. Di luar hubungan orang tua dengan anak, perkenalan boleh jadi hanya sekadar formalitas, yang tidak akan berlanjut kepada proses interaksi selanjutnya. Tetapi proses perkenalan bisa dinaikkan jenjangnya sampai pada tahap saling memahami dan saling percaya. Tentunya untuk sampai kepada tahap itu, akan membutuhkan waktu yang diwarnai dengan berbagai pengalaman. Bisa dibayangkan betapa indahnya kehidupan ini, jika satu dengan yang lainnya bisa saling memahami serta saling memberi dan diberi kepercayaan. Niscaya, konflik kecil akan mudah dihindari dan sebesar apapun konflik akan lebih mudah untuk diselesaikan.

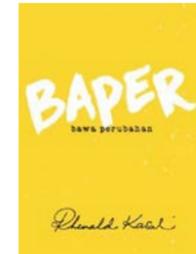
Konflik dalam sebuah hubungan bisa tersulut karena adanya prasangka atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu. Perkara prasangka ada pada setiap orang, tentunya dengan kadar yang tidak sama. Ya, wajar saja, karena manusia mampu berpikir dan mempunyai rasa atas sesuatu. Dan seringkali manusia menjadikan prasangka sebagai tameng kehati-hatian, meskipun kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan.

Benih-benih prasangka saat perkenalan justru akan semakin subur tanpa adanya upaya untuk saling menerima dan membuka diri. Lambat laun, sebuah prasangka berpotensi memengaruhi seseorang untuk salah sangka yang berkepanjangan, berpaling, dan mengabaikan berbagai fakta dan informasi yang dinilai

bertentangan dengan pendapat yang lebih dulu membingkai pikirannya. Sayangnya jika itu terjadi, maka prasangka akan mendominasi, mengaburkan kebenaran, serta menjadi cikal bakal kebencian dan permusuhan.

Prasangka bisa dikiaskan sebagai benalu pada sebuah pohon, yang sama sekali tidak memberi manfaat. Oleh karena itu, meskipun hanya secercah, prasangka patut untuk dihindari. Tidak cukup bagi kita untuk sekadar menata pemikiran dan perasaan yang dimiliki, karena dalam berinteraksi dengan orang lain diperlukan juga sikap saling memahami dan percaya. Meskipun harus melalui proses jatuh bangunnya suatu hubungan, sikap saling memahami dan percaya dapat menjadi pintu penutup prasangka dan menjadikan hubungan satu dengan yang lain tidak lagi terkesan *absurd*, tetapi merupakan hubungan yang benar-benar tulus dan saling menjaga.

**Teks** Titi Susanti



**Judul:**  
Baper : Bawa Perubahan  
**Pengarang:**  
Rhenald Kasali  
**Penerbit:**  
Noura Books  
**Kota Terbit:**  
Jakarta  
**Tahun Terbit:**  
November 2016  
**Deskripsi Fisik:**  
184 halaman  
**ISBN:**  
9786023851751

Kunjungi Perpustakaan  
Kementerian Keuangan  
dan Jejaring Sosial Kami:  
Gedung Djuanda I Lantai 2  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1  
Jakarta Pusat

Perpustakaan  
Kemenkeu

Perpustakaan  
Kementerian  
Keuangan

@kemenkeulib

www.perpustakaan.  
kemenkeu.go.id

## 5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 **Generasi 90an**  
Marchela FP
- 2 **Hujan Bulan Juni**  
Sapardi Djoko Darmono
- 3 **Koala Kumal**  
Raditya Dika
- 4 **Rembulan Tenggelam di Wajahmu**  
Tere Liye
- 5 **Ibuk**  
Iwan Setyawan

## 5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 **How to Win Friends and Influence People in The Digital Age**  
Dale Carnegie & Associates
- 2 **Make it Happen**  
Prita Hapsari Gozie
- 3 **Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe**  
HM Zaenudin
- 4 **Trik melejitkan Skor TPA: Versi OTO Bappenas, Updated Edition**  
Muhammad Amien
- 5 **Ladies, Belanjakan Saja Semua Uangmu!**  
Ai Nur Bayinah

# Cara Asik Untuk Baper

**P**erubahan belum tentu membuat sesuatu menjadi lebih baik. Namun tanpa perubahan, tidak akan ada pembaruan dan kemajuan. Masa depan bukanlah warisan orang tua melainkan upaya kaum muda. Kali ini Rhenald Kasali bersama dengan empat anak muda kreatif melahirkan sebuah buku "Baper : Bawa Perubahan". Keempat anak muda itu antara lain Jombang Santani Khairan, Fin Yourdan Kasali, Gerald Stefano, dan Adam Makalani Kasali. Keseriusan mereka dalam menghadirkan buku tersebut merupakan bukti bahwa tak semua anak muda bersikap acuh terhadap perubahan negeri ini.

Buku ini begitu ringan dibaca. Anda tidak akan menemukan strategi mendalam mengenai perubahan, tidak pula tentang strategi manajemen yang biasa ditemukan di surat kabar. Pembaca akan diantarkan pada ucapan, nasihat, dan candaan langsung dari mulut babe (sebutan untuk Rhenald Kasali) di berbagai suasana. Misalnya saat berada di pesawat, di kolam pemandian kerbau, di ujung rapat penting, ataupun di saung atas kolam nan asri.

Buku ini tidak melulu berisi kata-kata motivasi. Jika kita lebih jeli dan runut membaca setiap halaman, kesan yang muncul seperti orang tua sedang berkisah kepada anaknya. Kisah tentang segudang pengalaman yang telah dilalui, agar generasi selanjutnya dapat hidup

lebih baik. Tema yang disinggung pun sangat menarik, mulai dari urusan kelahiran anak, ekonomi, percintaan, kepemimpinan, kebangsaan, sekolah, pengembangan diri, hingga pengalaman unik Rhenald Kasali saat tinggal di Amerika. Membaca buku ini seolah mendengar secara langsung Rhenald Kasali bercerita dengan gayanya yang khas. Siapapun yang membaca akan mendapatkan inspirasi dan energi baru untuk melakukan perubahan.

Rhenald Kasali juga menyinggung pembentukan karakter anak sedari dini. Orang tua seharusnya mampu memberikan kepercayaan, tantangan dan dukungan kepada anak dengan tidak mengambil alih permasalahan mereka. Jika anak tidak mendapat kepercayaan, lambat laun akan anak memiliki kepribadian "passenger" (penumpang) yang menghindari segala jenis risiko. Ketujuh hal ini biasanya ditemukan pada orang berkepribadian "passenger": kurang gigih, kurang tekun, suka mencari pembenaran, tidak belajar dari kesalahan, tidak disiplin, dan tidak percaya diri.

Buku ini adalah hadiah kepada generasi muda yang diharapkan dapat membawa perubahan untuk Indonesia di masa depan. Daripada bawa perasaan, lebih baik bawa perubahan!

**Peresensi** Khrisna Pandu Pradana

# Mengisi Perut di Kota Medan

**S**ejak lama, Medan menjadi surga makanan enak. Setiap tahun, ada saja rumah makan baru yang hadir memuaskan para pencinta kuliner. Berikut lima kedai makan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang bukan hanya unik tetapi juga memanjakan lidah.

## Sosmed Café

Jika ingin mendapatkan suasana mutakhir, pastikan Anda mampir ke Sosmed Café. Berada di Jalan Teuku Umar No.3, Sosmed Café menawarkan dekorasi yang meriah. Menu-menu yang disajikan terinspirasi dari nama *platform* sosial media (sosmed). Disini Anda bisa memesan nasi lemak Facebook, nasi campur Twitter, dan nasi tim Instagram. Di samping itu, Sosmed Café juga menyediakan makanan yang sedang populer seperti samyang. Untuk minuman, Anda mesti mencoba sensasi minuman berasap yang diberi nama *blue ocean fog drinks*.

Sosmed Café biasanya ramai pada malam akhir pekan. Harga makanan dan minuman yang dijual berkisar antara Rp30-50 ribu rupiah. Urusan makan kini bukan hanya soal kenyang. Kafe ini juga memanjakan pengunjung dengan pojok-pojok berdekorasi keren yang menyegarkan mata. Jangan lupa berfoto dan mengunggahnya di akun sosmed Anda ya.

## Resep Nenek Moyang

Tak jauh dari Sosmed Café, terdapat sebuah kedai bernama Resep Nenek Moyang. Menu favorit di tempat ini adalah nasi 3 generasi (goreng, lemak, dan kuning) yang disajikan dalam satu piring. Cobalah pesan es buah *the Nenek Moyangku* yang mengandung asam atau biasa disebut *sombol* di Medan.

Resep Nenek Moyang, juga menawarkan penganan ringan seperti kue cubit yang diberi nama unik yaitu kue cubit nenek tajir dan cubit nenek perawan. Desain interior yang menyolok mata menjadi daya tarik bagi restoran ini. Banyak kutipan para pesohor yang dipajang di dinding. Atmosfir anak muda terasa begitu terasa di kedai yang terletak di seberang jalan Sosmed Café itu.

## Sowe

Jika Anda ingin menyantap menu ala barat, coba mampir ke Restoran Sowe di Jalan Gatot Subroto. Menu andalan yang paling diminati di sini adalah tenderloin steak salmon dan minuman *long island*. Sowe menjamin Anda tak akan kesal menunggu makanan yang lama datangnya. Di meja pengunjung sudah disediakan alat untuk mengukur batasan waktu makanan diantarakan.

Sowe tak hanya menyajikan masakan barat. Anda juga bisa menyantap masakan Indonesia seperti nasi goreng Kampoeng Keramat yang sedap. Harga makanan di

restoran yang sudah berdiri selama tiga tahun ini berkisar Rp30-180 ribu rupiah. Dengan interior klasik, pengunjung disambut dengan suasana hangat dari ornamen kayu dan pepohonan.

## Sam's Bistro

Tempat *nongkrong* berikutnya adalah Sam's Bistro. Ibarat sekali mendayang dua tiga pulau terlampaui, Anda bisa langsung mengunjungi dua tempat menarik lainnya di sini yaitu Rumah Kopi Wak Noer dan Sam's Bakery. Lokasinya ada di Jalan Uskup Agung 17. Di sini, Anda bisa memesan kopi, teh, hingga jus dan berbagai jenis roti dengan harga yang bersahabat.

## Dapur Bunda

Kafe terakhir yang wajib Anda kunjungi sebelum kembali ke kota asal adalah Dapur Bunda di kompleks Bandar Udara Kuala Namu. Sambil menunggu penerbangan, Anda bisa menikmati hidangan dengan pemandangan pesawat yang mendarat dan lepas landas. Menu wajib yang bisa Anda pesan di sini adalah soto Medan dengan perkedelnya yang khas. Harga makanan yang sedikit mahal karena lokasinya di dalam bandara terobati dengan suasana yang tenang dan nyaman.

Teks Dwinanda Ardhi Swasono

01 Restoran Sowe.

02 Sam's Bistro

03 minuman *the nenek moyangku*, nasi 3 generasi, dan kue cubit di Resep Nenek Moyangku.

04 Soto Medan Dapur Bunda.

05 *blue ocean fog drinks* Sosmed Café

Foto Jodie Umbara





## Ilmu Komunikasi Yang Menginspirasi

Menjadi seorang *communicator* bukanlah hal yang mudah. Dwi Noviratri atau lebih dikenal dengan nama Ira Koesno menjelaskan setidaknya diperlukan tiga faktor untuk dapat menjadi *communicator* yang baik. Pertama, seorang *communicator* harus banyak membaca. Dengan begitu, ia akan banyak memperoleh wawasan yang akan mendukungnya dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Yang tidak kalah penting, faktor kedua, adalah menjaga hubungan dengan narasumber atau klien. *Networking* harus tetap dijaga karena seringkali ia harus mendapatkan *insight story* dari narasumber.

"Karena kalau tidak tahu subyeknya, tidak cukup familiar dengan para narasumber yang ada, kita tidak bisa

melakukan improvisasi. Pada saat-saat tertentu memang perlu melakukan improvisasi karena dengan itu suasana bisa menjadi lebih hidup," ujar Ira saat diwawancara Media Keuangan usai memoderatori acara *Stakeholder Gathering* Kementerian Keuangan 2017. Yang terakhir, Ira menjelaskan juga terkait pentingnya melakukan latihan. Dengan latihan yang baik sebelum kegiatan akan mampu membantu untuk mensimulasikan paling tidak gambaran besar tugas dan apa yang perlu dilakukan untuk memitigasi hal-hal yang tidak diprediksikan sebelumnya.

Komunikasi merupakan pilihan awal Ira ketika panggilan jiwanya merasa belum cocok dengan pekerjaan awalnya sebagai auditor. Awal masuk dalam dunia jurnalistik, Ira merasa penting untuk ikut memberi pembaruan dalam politik di

Foto  
Dok. Biro KLI

Indonesia. Idealisme yang dibawanya saat itu turut mendukungnya menyuarakan reformasi melalui acara liputan 6 di SCTV yang dibawakannya. Slogan aktual, tajam dan terpercaya menjadikannya presenter yang mampu membawa era baru dalam kebebasan berpendapat. Kecintaannya pada bidang menulis juga turut menginspirasi Ira untuk terjun di dunia komunikasi. Melalui pekerjaannya, Ira ingin menggabungkan kecintaannya di bidang keuangan dan menulis.

Selepas mendapatkan gelar masternya pada tahun 1999 di Inggris, Ira terinspirasi untuk fokus pada bidang komunikasi dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan komunikasi. Ira menyelesaikan kuliah dengan jurusan Film dan Produksi Televisi di Universitas Bristol dan jurusan Jurnalistik International di Universitas Westminster. Agar lebih optimal berkecimpung di dunia komunikasi, ia pun memantapkan niatnya untuk keluar dari perusahaan yang membesarkan dirinya dan membangun dari awal perusahaan komunikasi yang ia beri nama Ira Koesno *Communication*.

Terkait dengan perannya dalam menjalin komunikasi yang baik dalam acara *Stakeholder Gathering* Kemenkeu, Ira yakin bahwa Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mampu melakukan reformasi perpajakan dengan baik. Namun, menurutnya hal itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Ia berpendapat pemerintah dan masyarakat harus berjalan secara bersama-sama. "Ini di satu sisi target penerimaannya harus realistis, akan tetapi tanpa bantuan dari semua *stakeholders*, terutama pemangku kepentingan kuncinya, rasanya akan menjadi berat sekali kalau harus dilakukan sendiri," tutup Ira.

Teks Abdul Aziz

# Mas Praim

Cerita : Hadiyanto

Gambar : Bimo Adi



# MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2017



Foto Gathot Subroto



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA